Motif Bantuan Australia Dalam Kerjasama Pendidikan di Indonesia Melalui *Education Sector Support Program* Pada Tahun 2011 – 2014

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dalam Bidang Hubungan Internasional

NAMA : LINRIANES

NIM : 115120400111026

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2019

repository.ub.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Motif Bantuan Australia Dalam Kerja Sama Pendidikan Di Indonesia

Melalui *Education Sector Support Program* Pada Tahun 2011 – 2014

SKRIPSI

Disusun oleh:
Linrianes
NIM. 115120400111026

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana
pada tanggal 19 Juli 2019
Tim Penguji,

Ketua Majelis Penguji	Sekertaris Majelis Penguji
Dewa Ayu Putu Eva Wishanti, S.IP., M.Si	**Firstyarinda Valentina Indraswari S.Sos., M.Si**
NIK. 2013098708022001	NIK. 2013098602142001
Penguji 1	Penguji 2
Adhi Cahya F., S.Hub.Int., MS	**Primadiana Yunita, S.IP., MA**
NIK.2018079106151001	NIP. 199006202019032023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Brawijaya

Prof. Dr. Unti Ludigdo, A.K
NIP. 1962 0814 1994 021001

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

Motif Bantuan Australia Dalam Kerja Sama Pendidikan Di Indonesia Melalui *Education Sector Support Program* Pada Tahun 2011 – 2014

SKRIPSI

Disusun oleh :

Linrianes

NIM. 115120401111028

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pemimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Adhi Cahya F., S.Hub.Int., MS	**Primadiana Yunita, S.IP., MA**
NIK.2018079106151001	NIP. 199006202019032023

Mengetahui

Kepala Program Studi Hubungan Internasional

Aswin Arryato Aziz. S.IP. M. DevSt

NIP. 197802202010121001

repository.ub.ac.id
© BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

ABSTRACT

Linrianes, Bachelor Degree, International Relations Programme, Faculty of Social and Political Science, University of Brawijaya Malang, 2019, Motive Foreign Aid Australia in Education Partnership with Indonesia at Education Sector Support Program from 2011 to 2014, Supervisor: Adhi Cahya F., S.Hub.Int., MS and Primadiana Yunita, S.IP., MA

Partnership between Australia - Indonesia has been established for a long time in the field of education since 1993 through of the Joint Working Group (JWG) and continued with MoU as a form of collaboration between the two countries so that the first delivery of education assistance was carried out through AIBEP which began in 2006 - 2010 which was then resumed through ESSP in 2010 - 2014.
However, in the implementation of the ESSP program experience decline based on the results of the Independent Complete Report (ICR) published by Australia. With this problem Australia has a motive in providing ESSP assistance to Indonesia. By using John Degnbol Martinussen and Poul Enberg in *Motive* and *Interest* concepts related to the provision of Australia-Indonesia assistance through the ESSP in 2010 - 2014.
This research is a descriptive study with used collects data, literature studies and analyzed using qualitative data analysis.

Keywords: ***Motive, Foreign Aid, Partnership, Education Sector Support Program, Australia, Indonesia***

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ABSTRAK

Linrianes, Program Sarjana, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2019, Motif Bantuan Australia Dalam Kerja Sama Pendidikan Di Indonesia Melalui *Education Sector Support Program* Pada Tahun 2011 – 2014, Tim Pembimbing: Adhi Cahya F., S.Hub.Int., MS dan Primadiana Yunita, S.IP., MA

Kerja sama antara Australia – Indonesia sudah terjalin cukup lama di bidang pendidikan sejak tahun 1993 melalui *Joint Working Group* (JWG) dan diteruskan melalui MoU sebagai bentuk dari kerjasama antar kedua negara sehingga pengiriman bantuan pendidikan pertama kali dilakukan melalui AIBEP yang dimulai pada tahun 2006 – 2010 yang kemudian dilanjutkan kembali melalui ESSP pada tahun 2010 – 2014.
Namun dalam pelaksanaan program ESSP mengalami penuruan berdasarkan pada hasil dari *Independent Complete Report* (ICR) yang dipubilikasikan oleh Australia. Dengan adanya permasalahan ini Australia memiliki motif dalam pemberian bantuan ESSP terhadap Indonesia. Dengan menggunakan konsep *Motive and Interest* milik John Degnbol Martinussen dan Poul Enberg terkait pemberian bantuan Australia – Indonesia melalui ESSP pada tahun 2010 – 2014.
Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif yang mengumpulkan data, studi kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Kata Kunci: Motif, Bantuan luar Negeri, Kerja Sama, *Education Sector Support Program,* Australia, Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan kerja sama antara Australia dan Indonesia tidak terlepas dari kebijakan luar negeri yang berdasarkan pada motif dan kepentingan masing – masing negara melalui berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Kerja sama Australia dan Indonesia di bidang pendidikan dimulai dari adanya *Joint Working Group* (JWG) yang telah dilaksanakan mulai tahun 1993. JWG yang sudah dilakukan sampai saat ini sebanyak sebelas kali dengan tempat pertemuan yang bergantian, antara Indonesia dan Australia.[1]

Tabel 1.1 Joint Working Group (JWG) Australia - Indonesia

Pertemuan	Tempat	Waktu	Tuan Rumah
JWG I	Canberra, Australia	Juni 1993	Australia
JWG II	Jakarta, Indonesia	Juni 1994	Indonesia
JWG III	Darwin, Australia	Juni 1995	Australia
JWG IV	Jakarta, Indonesia	Oktober 1996	Indonesia
JWG V	Bali, Indonesia	Februari 2001	Australia
JWG VI	Canberra, Australia	Maret 2003	Australia
JWG VII	Jakarta, Indonesia	Februari 2005	Indonesia
JWG VIII	Jakarta, Indonesia	Juni 2010	Indonesia
JWG IX	Canberra, Australia	Desember 2011	Australia

[1] Catatan perjalanan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. 2019.

JWG X	Jakarta, Indonesia	Mei 2013	Indonesia
JWG XI	Canberra, Australia	November 2014	Australia

Sumber: Catatan perjalanan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri

Dengan adanya hubungan yang baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia ini, Pemerintah Australia melalui lembaganya yaitu AusAID memberikan bantuan pendidikan terhadap Indonesia dengan nama *Australia Indonesia Basic Education Program* (AIBEP) pada tahun 2006 – 2010 dan *Education Sector Support Program* (ESSP) pada tahun 2010 – 2014.[2] Meskipun program ini merupakan program kerja sama pendidikan antara Australia dan Indonesia atau sering disebut dengan *Australia's Education Partnership with Indonesia*, namun program ini tetap merupakan program bantuan luar negeri yang diberikan Australia kepada Indonesia.

Seperti yang dikemukakan oleh Kurniawan, yang merupakan salah satu staf dari Biro Kerja sama Luar Negeri Bilateral Bappenas, bahwa terdapat beberapa bentuk bantuan luar negeri yang diterima oleh negara donor melalui pemberiannya, yaitu:[3]

1. Bantuan untuk pemerintah (*government to government*)

   Dalam pengertian dana bantuan untuk pemerintah merupakan dana bantuan yang digunakan untuk kegiatan proyek atau kegiatan pemerintah atas dasar usulan resmi dari pemerintah Indonesia yang sudah diatur atau dibuat berdasarkan kerangka kerja sama pembangunan bilateral atau kerangka kerja sama dengan lembaga multilateral atau internasional yang telah diberikan melalui MoU.

2. Bantuan untuk non – pemerintah (*government to private*)

---

[2] *Australia Indonesia Basic Education Program* (AIBEP). *Independent Completion Report*. Mei 2010. https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/aibep-executive-summary.pdf. Diakses pada tanggal 11 Mei 2019. Hal. 1

[3] Kurniawan Ariadi. *Hibah Luar Negeri APBN dan Grant Trap*. Edisi 23 Tahun 2003. https://www.bappenas.go.id/files/6313/5185/0724/kurniawan__20091015125220__2355__0.pdf. Diakses pada tanggal 19 Juni 2019. Hal. 6

Dalam pengertian bantuan untuk non – pemerintah merupakan dana bantuan yang diberikan dan disalurkan langsung oleh pemerintah atau lembaga donor kepada lembaga non – pemerintah berdasarkan kerangka kerja sama yang telah dibuat.

3. *Trust fund* dan *partnership*

Trust fund adalah suatu mekanisme yang beberapa donor (umumnya bilateral) menyalurkan hibahnya melalui satu donor lembaga multilateral (internasional atau regional) seperti *United Nations Development Program* (UNDP), *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF), *United Nations* (UN), *Asian Development Bank* (ADB) dan AusAID yang bertindak sebagai pengelola.

Sedangkan *partnership* merupakan salah satu bentuk yang sama seperti *trust fund*. Namun yang membedakan adalah di dalam *partnership* adalah dana hibah atau tenaga ahli yang digunakan untuk mendukung atau membiayai suatu kegiatan dalam bidang tertentu sudah disepakati bersama oleh para donor. Dan pelaksanaanya pola *partnership* tidak hanya melibatkan pemerintah saja namun lembaga non – pemerintah ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan dari pengertian diatas menjelaskan bahwa bantuan luar negeri Australia yang diberikan terhadap Indonesia melalui kerja sama pendidikan dalam program ESSP ini merupakan salah satu pola kerja sama yang saat ini dilakukan oleh negara donor khususnya Australia dalam memberikan bantuan kepada Indonesia melalui kerja sama atau sering disebut dengan *partnership*.

AIBEP ini sendiri merupakan program yang telah selesai dilaksanakan. Dimana evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan bantuan dari AIBEP ini telah dikeluarkan melalui *Independent Completion Report* (ICR), dengan hasil seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Hasil evaluasi pelaksanaan bantuan AIBEP Tahun 2006 - 2010

Evaluation Criteria	***Rating***
Relevance	*6*
Effectiveness	*5*
Efficiency	*4*
Sustainability	*4*
Gender Equality	*5*
Monitoring & Evaluation	*5*
Analysis & Learning	*5*

Sumber: *Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) Independent Completion Report* (ICR)

Keterangan:

1 – 4 = Kurang

5 – 6 = Baik

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa tidak semua kinerja yang telah dilakukan dalam AIBEP memiliki penilaian yang sempurna. Dimana penilaian atau evaluasi kriteria mengenai efektifitas, kesetaraan gender, pengawasan dan evaluasi, serta analisis dan pembelajaran mendapatkan poin lima dari enam, sedangkan evaluasi kriteria untuk efisiensi, keberlanjutan (*sustainability*) mendapatkan poin empat dari enam. Dimana dapat dilihat bahwa masih ada yang perlu dibenahi dari kriteria-kriteria tersebut.

Tidak hanya AIBEP yang diberikan evaluasi, ESSP yang telah selesai programnya pun turut di evaluasi kinerjanya. Dimana berdasarkan evaluasi dari *Independent Completion Report* (ICR) pada tahun 2014, ESSP memiliki penilaian sebagai berikut:[4]

[4] *Performance Oversight and Monitoring (POM) Education Partnership - Independent Completion Report (ICR)*. Desember 2016. https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/indonesia-education-partnership-completion-report.pdf. Diakses pada tanggal 1 Mei 2019. Hal. 48

Tabel 1.3 Hasil evaluasi pelaksanaan bantuan ESSP Tahun 2011 – 2014

Evaluation Criteria	***Rating***
Relevance	*4.25*
Efficiency	*4.50*
Effectiveness	*3.75*
Impact	*3.50*
Sustainability	*3.25*

Sumber: *Performance Oversight and Monitoring (POM) Education Partnership - Independent Completion Report* (ICR)

Keterangan:

1 – 4 = Kurang

5 – 6 = Baik

Pada evaluasi ESSP tahun 2014 ini, terjadi penurunan terhadap penilaian khususnya pada kriteria relevansi, efektivitas dan keberlanjutan (*sustainability*) jika dibandingkan dengan AIBEP tahun sebelumnya, dengan fokus bantuan yang sama, yaitu dalam bidang pendidikan. Namun, dapat dilihat bahwa dalam kriteria efisiensi terdapat sedikit kenaikan sebanyak 0.5 dari yang sebelumnya.

Dengan adanya dari hasil evaluasi bantuan program pendidikan yang telah dilakukan oleh negara Australia terhadap Indonesia dapat dilihat bahwa walaupun Australia melaksanakan program tersebut, pemberian bantuan terhadap Indonesia tidak terlepas dari *national interest* melalui *foreign policy* yang berdasarkan pada motif yang dimiliki.

Alan Rix menjelaskan bahwa pemberian bantuan luar negeri yang dilakukan oleh negara donor kepada negara penerima tidak terlepas dari adanya motif-motif tertentu yang

dimiliki oleh negara donor.[5] Hal ini dilakukan oleh negara donor sebagai sebagai salah satu instrument dalam kebijakan luar negeri dalam menacapai kepentingan atau tujuan negaranya.

Dengan dasar dari pendapat Alan Rix, penulis kemudian akan menjabarkan motif dan kepentingan Australia dalam pemberian bantuan luar negeri kepada Indonesia melalui ESSP. Berdasarkan dari permasalahan ini penulis membuat rumusan masalah yaitu a*pa motif Australia dalam kerja sama pendidikan di Indonesia melalui Education Sector Support Program (ESSP)* pada tahun 2011-2014.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah motif yang dimiliki pemerintah Australia dalam kerja sama pendidikan di Indonesia melalui *Education Sector Support Program (ESSP)* pada tahun 2011-2014?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah:

1. Penulis ingin memaparkan motif – motif apa saja yang dimiliki Australia terhadap Indonesia dalam memberikan bantuan pendidikan melalui *Education Sector Support Program* pada tahun 2011-2014.
2. Penulis ingin memaparkan bantuan yang diberikan Australia terhadap Indonesia melalui *Education Sector Support Program* pada tahun 2011-2014.

[5] Alan Rix. *Japan Foreign Aid Policy Reform and Aid Leadership*. 1993. Rotledge: London. Hal. 18

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 *Manfaat Teoritis*

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi penstudi Hubungan Internasional agar lebih memahami mengenai motif Australia memberi bantuan terhadap Indonesia melalui bantuan pendidikan melalui *Education Sector Support Program* pada tahun 2011-2014 dengan menggunakan konsep Martinussen dan Pedersen, yaitu *Motive and Interest* sebagai landasan bagi penulis untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara keseluruhan motif dari Australia melalui kerja sama pendidikan di Indonesia dalam ESSP dan menjadi refrensi penstudi lainnya mengingat bantuan luar negeri mempunyai banyak motif dalam pemberiannya terutama terhadap negara Indonesia di bidang pendidikan.

1.3.2.2 *Manfaat Praktis*

Dari hasil penlitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk pemikiran, referensi, dan masukan bagi para peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dalam melihat motif negara lain, khususnya Australia dalam pemberian bantuan luar negeri ke suatu negara, khususnya Indonesia, melalui kerja sama bidang pendidikan melalui suatu program yang dibuat oleh negara donor, khususnya dalam penelitian ini *Education Sector Support Program* pada tahun 2011-2014.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Terdahulu:

Dalam kajian ini penulis akan menggunakan dua studi terdahulu sebagai landasan dalam menyusun penelitian. Studi terdahulu yang pertama adalah jurnal dari Asra Virginita dan Maharani Pratiwi dari Universitas Indonesia yang berjudul *Motif Dibalik Pelaksanaan Program Milenium Challenge Account* (MCA) *Amerika Serika di Indonesia*. Tulisan ini menjelaskan mengenai program berkelanjutan Amerika Serikat melalui program yang bernama MCA yang pada awalnya program yang sudah dilakukan terhadap Indonesia mengalami kegagalan dalam memenuhi efektivitasnya. Bantuan ini diberikan kepada Indonesia dalam bentuk dana hibah yang dibedakan menjadi dua jenis yaitu *threshold program* dan *compact program*. Pada awalnya Indonesia mendapatkan hibah awal dalam bentuk *threshold* program pada tahun 2007 hingga 2009 sebesar $55 juta. Dalam pelaksanaanya Indonesia telah berhasil memenuhi indikator yang sudah ada di dalam program sehingga pada Desember 2008 Indonesia mendapatkan *compact program*. Dana hibah pun kembali diberikan sebesar $600 untuk jangka waktu lima tahun.[1]

[1] Asra Virginita & Mahanani Pratiwi. *Motif Dibalik Pelaksanaan Program Millenium Chalange Account (MCA) Amerika Serikat di Indonesia*. Jurnal Global & Strategis. Juni 2015. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs79b77a6853full.pdf. Diakses pada 3 Juni 2019. Hal. 125

Melalui tulisan dari Asra Virginita menjelaskan bahwa dalam penerimaan bantuan dari Amerika serikat berdasarkan dari program MCA memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu berdasarkan pada pendapatan per kapitanya negara tersebut harus merupakan *Low Income Country (LIC)* atau *Lower Middle-Income Country (LMIC),* negara penerima bantuan luar negeri tidak bertentangan secara hukum sebagai negara penerima bantuan AS, dan negara penerima bantuan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan MCA. Dan penilaian yang digunakan dalam MCA ini terdiri dari tiga kategori, yaitu pemerintahan yang adil (*ruling justly*), investasi sumber daya manusia (*investing in people*), dan kebebasan untuk mengarahkan dan melakukan kegiatan ekonomi (*economic freedom*) dengan berbagai indikator.[2]

Untuk indikator dari kategori pemerintahan yang adil (*ruling justly*) menjelaskan akan terjaminnya hak-hak politik (*political rights*), hak-hak sipil (*civil liberties*), kontrol terhadap penggunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi (*control of corruption*), pemerintahan yang efektif (*government effectiveness*), penegakan hukum (*rule of law*), dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan kebebasan berekspresi, berorganisasi dan media massa (*voice and accountability*).[3] Dan untuk kategori indikator dari investasi sumber daya manusia (*investing in people*) dapat dilihat dari peningkatan imunisasi terhadap anak-anak (*immunization rate*), anggaran belanja negara untuk sektor kesehatan

[2] Asra Virginita & Mahanani Pratiwi. *Motif Dibalik Pelaksanaan Program Millenium Chalange Account (MCA) Amerika Serikat di Indonesia*. Jurnal Global & Strategis. Juni 2015. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs79b77a6853full.pdf. Diakses pada 3 Juni 2019. Hal. 124

[3] Ibid.

(*health expenditures*), anggaran belanja negara untuk pendidikan primer atau dasar (*primary educations expenditures*), penilaian jumlah anak perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan dasar (*girl's primary education completion*), dan melakukan manajemen terhadap sumber daya alam (*natural resources management*). Sedangkan indikator dari (*economic freedom*) digambarkan melalui kualitas regulasi (*regulatory quality*), hak kepemilikan dan akses atas tanah (*land rights and access*), kemampuan untuk memulai bisnis (*business start-up*), kebijakan perdagangan (*trade policy*), tingkat inflasi (*inflation*) dan kebijakan fiscal (*fiscal policy*).[4] Dalam menerapkan sistem atau aturan yang ditetapkan oleh MCC kepada negara penerima pada tahun 2009 adalah pencapaian negara donor berdasarkan dari 6 indikator yang disebutkan sebelumnya berada dalam indikator *control of corruption* dan untuk indikator *investing people* yang dinilai berdasarkan dari 5 indikator yang telah disebutkan memiliki penilaian tinggi berdasarkan dari laporan MCC.[5]

Ketika negara Indonesia dalam melaksanakan program dari Amerika Serikat melalui MCA mengalami penurunan dalam mencapai indikator-indikator yang sudah disepakati dan ditetapkan sebelumnya. Namun Amerika masih tetap melanjutkan *compat program* terhadap Indonesia pada tahun 2011. Menurut Asra Virginita dan Maharani Pratiwi melalui penelitiannya menemukan dua alasan atau

---

[4] Asra Virginita & Mahanani Pratiwi. *Motif Dibalik Pelaksanaan Program Millenium Chalange Account (MCA) Amerika Serikat di Indonesia*. Jurnal Global & Strategis. Juni 2015. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs79b77a6853full.pdf. Diakses pada 3 Juni 2019. Hal 124 – 125.

[5] Ibid. Hal. 125

motif Amerika Serikat dalam memberikan bantuan tersebut yaitu berdasarkan atas motif ekonomi dan motif politik.

Dalam motif politik menurutnya negara Amerika Serikat memiliki hubungan dengan adanya upaya dan keterlibatan dalam isu pelestarian lingkungan yang ada di internasional. Motif ini dilihat melalui Amerika Serikat yang tidak dapat memenuhi indikator yang ditetapkan melalui *Protocol Kyoto* yang berisikan tentang seluruh negara yang ada di dunia harus atau memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi gas zat karbon kecuali negara China dan negara berkembang lainnya.[6] Dengan adanya hal ini menurut Asra Viriginita dan Maharani Pratiwi melihat bahwa negara Amerika Serikat tidak patuh atau memiliki komitmen dalam mengurangi emisi dengan memberikan tanggapan bahwa negara China dan negara berkembang lainya tidak memiliki kewajiban yang sama dalam mengurangi emisi gas zat karbon. Sehingga Amerika Serikat melalui pemberian bantuan terhadap Indonesia melalui proyek MCA dilakukan dengan adanya pengembangan masyarakat dalam menjaga kelestarian air yang menjadi sumber daya utama dalam kegiatan MCA melalui mejaga hutan dan pengembangan PLTMH.[7]

Sedangkan untuk dalam aspek ekonomi menurut Asra Viriginita dan Maharani Pratiwi negara Amerika Serikat memiliki kegiatan eksplorasi perusahan minyak dan gas teradap daerah provinsi Sulawesi Barat yang menurutnya kaya

---

[6] Asra Virginita & Mahanani Pratiwi. *Motif Dibalik Pelaksanaan Program Millenium Chalange Account (MCA) Amerika Serikat di Indonesia*. Jurnal Global & Strategis. Juni 2015. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs79b77a6853full.pdf. Diakses pada 3 Juni 2019. Hal. 131

[7] Ibid.

akan sumber dayanya. Dengan adanya hal ini perusahan asing melakukan investasi terhadap negara Indonesia di Sulawesi Barat seperti PT. Conoco Philips di Blok Kuma, PT Stat Oil di blok Karama Kabupaten Mamuju, PT Exxon Mobil di blok Suremana dan blok Mandar serta PT Marathon Indonesia di blok Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Dibeberapa kawasan proyek MCA seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan NTB terdapat perusahan Amerika Serikat yang bergerak dalam ekpslorasi minyak dan gas (migas) seperti Chevron dan Conoco Philips. Provinsi Riau dan Kalimantan Timur adalah daerah untuk eksplorasi migas bagi Chevron dan Conoco Philips melakukan eksplorasi di daerah Kalimantan Timur.[8]

Berdasarkan hal ini Asra Virginita dan Maharani Pratiwi menyimpulkan bahwa negara Amerika Serikat melalui pemerintahannya melakukan upaya dalam melindungi perusahan yang ada di Indonesia yang dinilai memiliki respon negatif dari eksplorasi migas. Dengan melaksanakan program proyek MCA terhadap masyarakat dapat tercipta situasi yang kondusif sehingga pada proses eksplorasi migas yang dilakukan perusahaan Ameriak Serikat dapat berjalan dengan baik. Dengan upaya pemerintah Amerika Serikat dalam proyek MCA yang dilaksanakan terhadap masyarakat di daerah tempat perusahan Amerika Serikat melakukan ekslporasi sumber daya alam membuktikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan baik secara langsung dan tidak langsung serta membuat citra

[8] Asra Virginita & Mahanani Pratiwi. *Motif Dibalik Pelaksanaan Program Millenium Chalange Account (MCA) Amerika Serikat di Indonesia*. Jurnal Global & Strategis. Juni 2015. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs79b77a6853full.pdf. Diakses pada 3 Juni 2019. Hal. 132

positif pemerintah Amerika Serikat terhadap masyarakat menjadikan salah satu motif Amerika Serikat dalam pemberian bantuannya.

Sedangkan dalam motif ekonomi menurut dari Asra Virginita dan Maharani Pratiwi, negara Amerika Serikat selain melindungi perusahaan minyak dan gas Amerika yang berada di Indonesia juga melakukan perluasan pasar di Indonesia melalui sektor kesehatan dan farmasi serta peningkatan imunisasi pada anak menjadi salah satu bentuk program yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui MCA menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produk obat-obatan dari Amerika Serikat terhadap negara Indonesia.[9] Kebijakan bantuan luar negeri menurut Asra Virginita dan Mahanani Pratiwi merupakan salah satu yang saling berkaitan dalam kepentingan politis dan pertimbangan strategis negara donor. Hal ini dipandang lebih penting daripada kepentingan ekonomi dan performa politis negara penerima bantuan. Bantuan luar negeri seperti halnya melalui diplomasi, propaganda, atau aksi militer adalah instrument dalam sebuah negara untuk menanamkan control atau pengruh dari pandangan negara donor dan pandangan akan kebijakanluar negeri untuk melakukan hubungan politik dan diplomatic terhadap negara berkembang.

Dengan adanya studi terdahulu ini bagi penulis memiliki kontribusi dalam menggunakan konsep yaitu konsep Jhon Dengbol – Martinussen dan Paul Enberg Pedersen untuk menganalisa permasalahan yang penulis angkat yaitu mengenaii motif Australia dalam kerja sama pendidikan di Indonesia melalui ESSP dengan

[9] Asra Virginita & Mahanani Pratiwi. *Motif Dibalik Pelaksanaan Program Millenium Chalange Account (MCA) Amerika Serikat di Indonesia*. Jurnal Global & Strategis. Juni 2015. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs79b77a6853full.pdf. Diakses pada 3 Juni 2019. Hal. 133

melihat pada variabel dan indikator yang digunakan oleh Asra Virginita dan Maharani Pratiwi dalam melihat motif sesungguhnya Amerika Serikat terhadap Indonesia melalui program MCA. Sedangkan untuk perbedaan terhadap studi terdahulu yaitu dalam rumusan masalah yang dibahas yaitu dalam studi terdahulu mengangkat isu motif bantuan luar negeri yang dimiliki oleh Amerika di Indonesia melalui program MCA dan untuk penulis mengangkat isu motif Australia dalam kerja sama pendidikan di Indonesia melalui program ESSP.

Untuk studi terdahulu kedua diambil dari sebuah disertasi dari Fiona Baily dengan judul *North-South Education Partnership, A Critical Analysis: An Ireland, Uganda, Lesotho and Zambia Case Study*. Dalam tulisan Fiona menjelaskan mengenai negara Irlandia dalam kemitraan terhadap negara Uganda, Lesotho dan Zambia dalam melihat eksistensi kerja sama dalam bidang pendidikan dalam mengembangkan pendidikan yang adil melalui pendidikan terhadap guru-guru di ketiga negara beserta relevansi pelaksanaan program tersebut. Menurut Fiona negara Irlandia dalam memberikan bantuan luar negeri di bidang pendidikan terhadap negara Uganda, Lesoto dan Zambia dalam melaksanakan kerja sama terhadap ketiga negara ini yang berdasarkan pada relevansinya terhadap dunia pendidikan melalui pelatihan guru-guru dalam meningkatkan kualitas masih lemah. Hal ini dikarenakan guru-guru atau pengajar di ketiga negara ini melihat bahwa bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara Irlandia terhadap negara Uganda, Lesoto dan Zambia melihat bahwa bantuan luar negeri Irlandia di bidang pendidikan dianggap sebagai salah satu kewajiban negara Irlandia selaku negara donor untuk membantu atau memberikan kepada negara berkembang atau negara

Uganda, Lesoto, dan Zambia.[10] Walaupun demikian, negara Irlandia selaku sebagai negara donor tetap melakukan pemberian bantuan pendidikan terhadap negara Uganda, Lesoto dan Zambia untuk kedua kalinya. Sehingga menurut Fiona, bantuan luar negeri yang diberikan kepada ketiga negara mengkritik dalam segi efektivitasnya mengingat bahwa bantuan sebelumnya dianggap oleh negara penerima sebagai kewajiban negara donor.

Fiona menilai bahwa negara Irlandia memiliki motif tersembunyi dalam pemberian bantuan luar negeri melalui kerja sama terhadap Uganda, Lesoto, dan Zambia. Menurutnya kepatuhan ketiga negara ini terhadap negara Irlandia dengan menggunakan bahasa Irlandia di ketiga negara ini menunjukan bahwa negara Irlandia berhasil membawa kepentingan nasionalnya terhadap ketiga negara ini. Selain itu menurut Fiona negara Irlandia kurang memperhatikan dalam isu-isu politik yang ada di Uganda, Zambia, dan Lesoto yang menurut negara Irlandia tidak ada hubungan sama sekali dan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan terhadap ketiga negara ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh negara Irlandia karena menurut negara Uganda, Zambia dan Lesoto melihat bahwa bantuan luar negeri dari Irlandia sebagai bantuan yang

[10] Fiona Baily. *North – South Educational Partnership, A Critical Analysis: An Ireland, Uganda, Lesotho and Zambia Case Study*. Januari 2016. https://dspace.mic.ul.ie/bitstream/handle/10395/2066/Baily%2C%20Fiona%20%282016%29%20North-South%20educational%20partnership%2C%20a%20critical%20analysis%20an%20Ireland%2C%20Uganda%2C%20Lesotho%20and%20Zambia%20case%20study%20Phd.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Diakses pada tanggal 7 Juni 2019. Hal. 314 – 332

menjadi kewajiban untuk negarra mereka sehingga dalam pelaksanaanya tidak efektif.[11]:

Dalam tulisan Fiona memiliki kontribusi terhadap gambaran mengenai motif bantuan pendidikan yang diberikan oleh negara donor terhadap negara penerima melalui kerja sama yang membantu penulis dalam melihat motif negara donor terhadap negara penerima melalui efektivitas pelaksanaan program bantuan pendidikan yang diberikan oleh negara donor yaitu negara Irlandia terhadap negara penerima yaitu negara Uganda, Lesoto, dan Zambia. Sedangkan untuk perbedaan studi terdahulu milik Fiona dengan penulis adalah isu yang diangkat. Dalam studi terdahulu milik Fiona membahas mengenai negara Irlandia dalam pemberian bantuan luar negeri di bidang pendidikan terhadap negara Uganda, Zambia, dan Lesoto dalam mengkritik kebijakan yang dibuat oleh negara Irlandia terhadap ketiga negara tersebut baik dalam pelaksanaan program, isu politik di negara di Afrika, dan sebagainya. Sedangkan isu yang diangkat oleh penulis mengangkat isu motif negara Australia terhadap Indonesia dalam kerja sama pendidikan melalui ESSP.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Pengertian Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid)*

Pengertian bantuan luar negeri sebenarnya sudah dilakukan sejak Perang Dunia II hingga saat ini sebagai salah satu instrument penting bagi negara lain sebagai kebijakan luar negeri dalam mencapai tujuan atau kepentingan nasional.

[11] Ibid.

Menurut Robert Gilpin dalam arti sempit mendefinisikan bantuan luar negeri merupakan bantuan yang diberikan negara donor kepada negara yang kurang maju atau sering disebut dengan miskin dalam berupa uang atau dana.[12]

Sedangkan menurut Holsti dalam arti luas mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai sebuah bentuk transfer uang, barang, teknologi atau bantuan teknis dari negara pendonor kepada negara penerima yang merupakan instrument dari sebua kebijakan yang telah dipakai oleh banyak negara dalam melakukan hubungan kerja sama luar negeri.[13] Menurut *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai pemberian dana publik dengan tujuan untuk pengembangan ekonomi, sosial dan politik di negara berkembang.[14] Sedangkan Lancaster berpendapat bahwa:

> *Foreign aid defined here as voluntary transfer of public resources from government to another independent government, to an NGO or to an International organization with at least 25% grant element one goal of which is to better the human condition in the country receiving the aid.*[15]

Pada awalnya bantuan luar negeri tidak hanya menguntungkan negara penerima bantuan atau *recipient*, namun juga mendatangkan keuntungan bagi

---

[12] Robert Gilpin. 1978. *The Political Economy of International Relations.* New Jersey: Princenton. University Press. Hal. 311

[13] K.J Holsti. *International Politics: A Framework for Analysis.* London: Prentice-Hall International, Inc. 1974. Hal 257-259.

[14] Carol Lancaster. 2000. *Transforming Foreign Aid – United State Assistance in 21st Cemtury.* Hal. 9

[15] Carol Lancaster. 2007. *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*. Hal. 9

negara donor. David Sogge menjelaskan dalam pengertian bantuan luar negeri yaitu:

> *Aid Chains are system of power. They consist of line of command for the top. They afford a lot of control but they are not almighty. For funny things can happened to policies as they travel down aid chains. Mid – level authorities, business go – betweens, reciving – end officials and intended beneficiaries do not have behave like printed circuit boards.*[16]

Menurut pernyataan diatas Sogge menjelaskan bahwa bantuan luar negeri merupakan salah satu bagian dari sebuah sistem kekuasaan. Menurutnya bantuan luar negeri diberikan kepada negara penerima melalui empat bagian dari negara donor seperti *aid agency or bank, an operator in the public or private sector, a national or local authority,* dan *local collaborating bodies in the public or private sectors* yang mempunyai fungsi sebagai *advisers, suppliers, media,* dan *evaluators* yang kemudian dibentuk menjadi kebijakan luar negeri negara donor sebagai alat kepentingan negara donor melalui bantuan luar negeri yang diberikan kepada negara penerima.[17]

Namun Martinussen dan Pedersen berpendapat lain dalam melihat bantuan luar negeri. Martinussen dan Pedersen melihat bantuan luar negeri merupakan salah satu bentuk kerja sama pembangunan internasional dengan berbagai aktor yang masing-masing memiliki motif, kepentingan, tujuan dan strategi yang

[16] David Sogge. 2002. *Give and Take: Whats The Matter with Foreign Aid*. London: Zed Book. Hal. 65
[17] Ibid.

digunakan dalam pemberiannya.[18] Hal ini dikarenakan pemberian bantuan luar negeri tidak hanya dilakukan oleh pemerintah negara sebagai aktor politik di internasional, melainkan pemberian bantuan luar negeri dapat diberikan melalui *International Organization* (IGO)*, Non – Govermental Organization* (NGOs) dan kelompok lain dalam melakukannya.[19]

Sedangkan untuk negara penerima bantuan atau *recipient* biasanya dilakukan oleh beberapa aktor seperti NGOs, kelompok penerima bantuan dan badan lainnya yang ada di negara penerima dalam pemberiannya. Dalam pemberian bantuan luar negeri negara pendonor bersama-sama dengan negara penerima merumuskan *framework* atau sering disebut dengan kerangka kerja dalam mencapai tujuan, strategi dan penunjukan peserta bantuan luar negeri yang akan dilaksanakan.[20] Kemudian negara donor dengan negara penerima akan menentukan bagaimana implementasi untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan agar dapat tersalurkan atau tersampaikan terhadap target yang ingin dituju. Dan pada tahap terakhir bantuan luar negeri yang telah diberikan ke negara penerima akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaanya baik dalam bentuk relevansi, efektifitas, efisiensi, dan implikasi dalam pelaksanaan bantuan yang diberikan kepada negara penerima yang didukung dengan penunjukan tim evaluasi yang telah dibuat bersama-sama antara negara donor dengan negara penerima.

---

[18] Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book. Hal. 1
[19] Ibid. Hal. 2
[20] Ibid.

Dan pada tahap terakhir, negara donor akan membuat kesimpulan mengenai keberlanjutan pemberian bantuan antara negara donor dengan negara penerima berdasarkan dari hasil akhir bantuan tersebut.[21] Untuk memahami proses pemberian bantuan luar negeri yang diberikan negara donor ke negara penerima melalui konsep Martinussen dan Pedersen akan dijelaskan melalui gambar dibawah ini.

Gambar 2.1 Proses Bantuan Luar Negeri

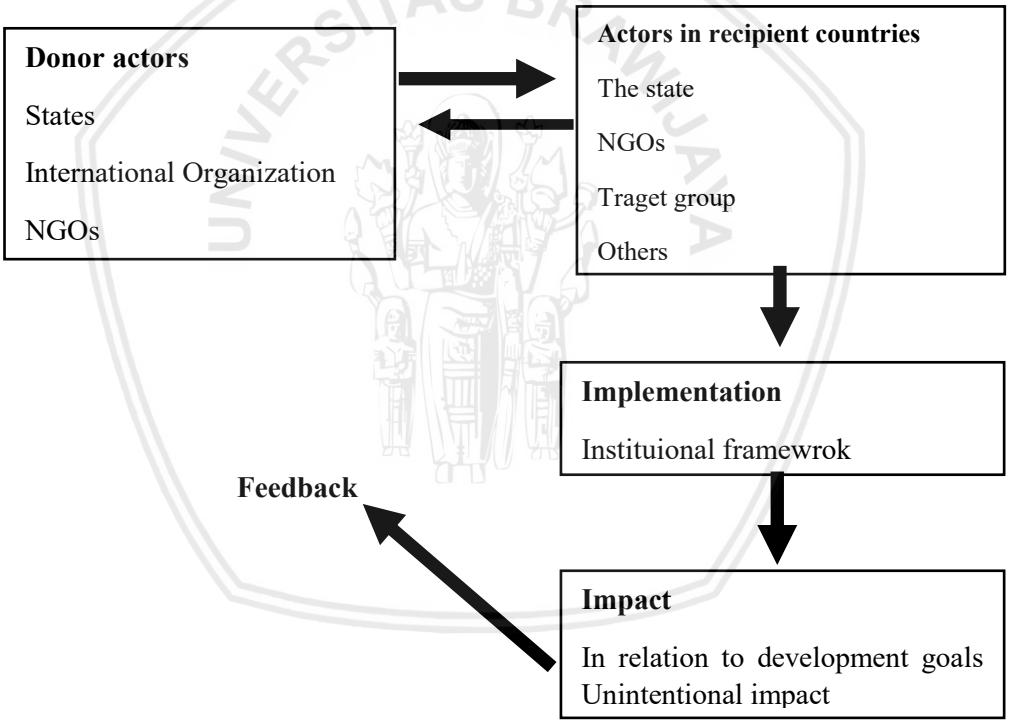

Sumber: Proses Bantuan Luar Negeri Martinussen dan Pedersen

Bantuan luar negeri berdasarkan dari sumbernya dibedakan menjadi dua bagian yaitu *bilateral aid* dan *multilateral aid*. *Bilateral aid* merupakan bantuan luar negeri yang diberikan dari pemerintah negara donor ke pemerintah negara

[21] Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book. Hal. 2

penerima melalui kerja sama bilateral. Bantuan ini sering disesuaikan dengan berbagai pertimbangan politik dan strategis yang bertujuan untuk proyek jangka panjang dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi, demokrasi, stabilitas, dan pembangunan. Di satu sisi lain para negara donor lebih suka memberikan bantuan luar negerinya melauli *bilateral aid*. Hal ini disebabkan karena negara donor dapat memiliki akses kontrol yang lebih kuat terhadap pemberian bantuan tersebut. Sumber kedua yaitu berasal dari *multilateral aid* yang merupakan bantuan dari berbagai pemerintah dunia seperti World Bank, UN, ADB, dan IMF dalam mengurangi kemisikinan di negara berkembang khususnya negara penerima. *Multilateral aid* merupakan bantuan luar negeri yang tidak mengikat, artinya bantuan ini memberikan kelonggaran bagi negara penerima untuk mengontrol sendiri bantuan tersebut dan membatasi keterlibatan negara donor dalam mencapai kepentingannya atau *self – interest*.[22]

2.2.2. Definisi Konsep *Motives and Interest*

Untuk mengetahui motif dan kepentingan Australia dalam pemberian bantuan luar negeri penulis menggunakan konsep motif dan kepentingan bantuan luar negeri seperti yang dijelaskan oleh Martinussen dan Pedersen. Martinussen dan Pedersen melihat bahwa motif dan kepentingan memiliki keterkaitan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri dalam pemberian bantuan luar negeri negara donor ke negara penerima.

[22] Helen V Milner. *Why Multilateralism? Foreign Aid Domestic Principal Agent Problem*. 2006. Hal. 114.

Martinussen dan Pedersen beranggapan bahwa motif sebagai alasan asli atau *original reason* negara donor untuk memberikan bantuan luar negerinya ke negara penerima. Menurutnya motif negara donor dapat dibedakan menjadi dua yaitu motif pembangunan dan motif khusus. Dalam motif pembangunan menjelaskan bahwa pemberian bantuan luar negeri diberikan melalui kerja sama pembangunan dalam meningkatkan pembangunan di negara penerima. Dalam hal ini negara donor memberitahukan alasan secara umum untuk memberikan bantuan luar negeri dan mengirim bantuan tersebut ke negara penerima dengan tujuan untuk pembangunan di negara penerima. Sedangkan untuk motif khusus diartikan sebagai alasan asli negara donor untuk memberikan bantuan kepada negara penerima yang bantuan yang tidak memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan atau berorientasi pada *self – interest* yang dimiliki oleh negara donor seperti kepentingan politik, kemanan nasional, ekonomi dan motif ini tidak dipulikasikan secara umum atau bersifat khusus.[23]

Martinussen dan Pedersen menyebutkan bahwa terdapat empat motif yang dimiliki negara donor ke negara penerima yaitu: *national security and political motives, environmental motives, economic motives,* dan *moral humanitarian motives*. Keempat motif ini dianggap sebagai pertimbangan negara donor untuk memberikan bantuan luar negeri ke negara penerima.

1. Motif politik dan keamanan nasional

[23] Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book. Hal. 7

Kebijakan pemberian bantuan luar negeri menurut Martinussen dan Pedersen sering digunakan sebagai instrument bagi negara donor untuk melindungi kepentingan politik dan keamanan nasionalnya. Meskipun motif politik dan kepentingan nasional sangat jarang untuk dijadikan alasan resmi dalam pemberian bantuan luar negeri namun hal ini tidak merubah fakta bahwa beberapa negara industri dan negara kaya mendistribusikan sebagaian besar bantuann luar negerinya atau *development assistance* untuk mencapai kepentingan negaranya melalui *peace and security*, *diplomatic relation* dan *diplomatic power*.[24] Dengan adanya penjelasan ini menjadi ciri utama bagi negara donor untuk membuat kebijakan luar negerinya melalui bantuan luar negeri dalam motif dan kepentingan politik.

Bantuan militer atau sering disebut dengan *military aid* menurut Martinussen dan Pedersen sering digunakan negara donor sebagai sarana untuk membentuk aliansi baik secara militer maupun secara politik. Namun dalam beberapa prakteknya, pemberian bantuan luar negeri yang dilakukan oleh negara donor sangat dalam memberikan bantuan melalui bidang militer jarang ditemui karena negara donor memberikan bantuan dalam bidang pembangunan. Walaupun demikian pemberian bantuan yang dilakukan oleh negara donor kepada negara penerima akan disesuaikan

[24]Daniel Ehrendfeld. *Foreign Aid Effectiveness Political Rights and Bilateral Distribution. Jounral of Humanitarian Assistance*. https://sites.tufts.edu/jha/archives/75. Februari 2004. Diakses pada 7 Juni 2019

dengan *national security* dari negara donor melalui *peace and security* untuk menjaga kemanan dan perdamaian di sekitar daerah teritorinya.[25]

Dalam melihat motif dan kepentingan politik, bantuan luar negeri secara tidak langsung juga memiliki kekuatan diplomatik atau sering disebut dengan *diplomatic power* bagi negara donor di sistem tatanan dunia internasional terutama bagi negara donor yang tergabung dalam organisasi internasional seperti *United Nations* (UN), *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF) dan organisasi internasional lainnya.[26] Namun organisasi internasional ini dalam pemberian bantuan luar negeri membutuhkan pemungutan suara atau sering disebut dengan *voting* untuk mencapai kesepakatan bersama terhadap negara anggota dalam organisasi tersebut. Dengan adanya hal seperti ini, negara donor yang merupakan salah satu bagian dari anggota organisasi internasional tersebut memiliki dukungan politik atau *diplomatic power* dalam motif dan kepentingan politik negara donor.[27]

Dan dengan adanya dukungan politik atau *diplomatic power* maka negara donor akan memiliki hubungan diplomasi atau sering disebut dengan *diplomatic relations* terhadap negara penerima melalui organisasi internasional dalam pemberian bantuan luar negeri. Hal ini dilakukan

---

[25] Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book. Hal. 12

[26] Ibid

[27] Martinussen dan Pedersen dalam tulisan Asante Oduro Michael. *China as a Game Changer in Aid and Diplomatic Relations: A Case of Norwegian Aid and Diplomatic Relation in Africa*. 2006 Master Thesis of Faculty of Social Science. Departement of International Enviroment and Development Studies. Norwegian University. https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/bitstream/handle/11250/2398869/Final%20Thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Diakses pada 7 Juni 2019. Hal. 35

negara donor untuk meningkatkan hubungan kerjasma terhadap negara penerima melalui organisasi internasional yang berlandaskan pada *self – interest* negara donor melalui pemberian bantuan.[28]

2. Motif ekonomi

Menurut Martinussen dan Pedersen pemberian bantuan luar negeri dari negara donor ke negara penerima merupakan salah satu bentuk motif ekonomi yang dilakukan untuk menjaga hak akses atau sering disebut dengan *maintain privilege access* terhadap sumber daya dan pasar yang dimiliki oleh negara penerima. Hal ini dapat dilihat melalui negara penjajah yang cenderung lebih memilih memberikan bantuannya kepada negara bekas jajahannya untuk menjaga hak akses terhadap sumber daya dan pasar di wilayah negara bekas jajahan. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk negara yang tidak begitu memainkan peran penting dalam penjajahan seperti Australia, Kanada dan Jerman yang dalam pemberian bantuan luar negerinya lebih mempertimbangkan kepentingannya dalam hubungan perdagangan atau sering disebut dengan *trade relations*.[29]

Dalam hubungan perdagangan atau sering disebut dengan *trade relations* pemberian bantuan luar negeri yang dilakukan oleh negara donor biasanya memiliki sifat mengikat.[30] Hal ini disebabkan karena negara donor memiliki motif ekonomi di bidang ekspor dan import barang atau jasa terhadap negara penerima. Negara donor berharap dengan memberikan bantuan terhadap negara penerima selain dapat meningkatkan

[28] Martinussen dan Pedersen. *Op.Cit.* Hal. 12
[29] Ibid.
[30] Martinussen dan Pedersen. *Op.Cit*. Hal. 12

pembangunan dalam bidang ekonomi, juga dapat membeli barang atau jasa yang dimiliki oleh negara penerima.[31]

Dengan adanya hubungan perdagangan atau sering disebut dengan *trade relations*, negara donor memberikan bantuan terhadap negara penerima sebagai salah satu bentuk *investment* dalam meningkatkan hubungan kerja sama di bidang ekonomi terhadap negara penerima dalam waktu jangka panjang. Sehingga dengan adanya hal seperti ini negara donor dilihat memiliki motif ekonomi terhadap negara penerima dalam bentuk *investment*.[32]

3. Motif lingkungan

Selain adanya motif ekonomi dan keamanan nasional, pemberian bantuan luar negeri atau *development assistance* yang dilakukan negara donor juga memiliki motif lingkungan yang memiliki latar belakang dari kondisi kerusakan lingkungan di dunia sejak tahun 1980-an. Berdasarkan dari laporan *The Brundtland Commision* pada tahun 1987 negara donor dan organisasi internasional telah menempatkan beberapa upaya untuk melindungi lingkungan di dalam agendanya. Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa setiap negara yang ada di internasional memiliki ketergantungan dan kepentingan global dalam melindungi lingkungan.[33]

Dengan adanya hal Martinussen dan Pedersen menjelaskan bahwa dalam mengambil langkah dan mengimplementasikan strategi baru untuk memperbaiki lingkungan yang akan dilakukan oleh negara donor terhadap

[31] Ibid.
[32] Ibid. Hal. 13
[33] Martinussen dan Pedersen. *Op.Cit*. Hal. 15

negara berkembang dapat dilihat melalui dua cara yaitu melalui *environmental improvement* dan *international responsibility*.[34]

Environmental improvement dapat dilihat dengan adanya upaya dari negara donor untuk membantu mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan yang sedang terjadi. Upaya dari negara donor dalam upaya memperbaiki lingkungan akan berkontribusi untuk mencegah dampak lintas batas atas kerusakan lingkungan. Dalam bidang lingkungan merupakan salah satu cara bagi negara donor untuk menangani permasalahan lingkungan global di luar batas wilayah negaranya berdasarkan pada *national interest* negara donor dalam pemberian bantuan.[35]

International responsibility diartikan sebagai dengan adanya tindakan dari negara donor terhadap permasalahan lingkungan yang sedang terjadi di negara penerima akan terlihat sebagai mempromosikan dirinya di dunia internasional. Menurut Martinussen dan Pedersen mengatakan bahwa negara donor sebagai negara yang memperhatikan isu lingkungan di negara penerima juga akan dinilai oleh dunia internasional memiliki tanggung jawab yang sama seperti yang dilakukan oleh dunia internasional dalam memperbaiki lingkungan.[36] Sehingga dengan adanya rasa tanggung jawab berasama, negara donor secara tidak langsung telah memperlihatkan motif lingkungan dalam mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sesuai dengan *national interest* negara donor.

[34] Ibid. Hal. 16
[35] Ibid.
[36] Martinussen dan Pedersen. *Op. Cit.* Hal. 16

Pada tahun 1990 *The South Commision's Report* menyatakan bahwa keberlanjutan dan semakin meluasnya kemiskinan di negara berkembang merupakan salah satu faktor penyebab dari kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi di negara berkembang saja namun kerusakan lingkungan terjadi di global. Salah satu faktor terjadinya kemiskinan adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk, hal ini kemudian menimbulkan tekanan yang besar pada penggunaan sumber daya bumi. Dari pertimbangan tersebut *The South Commision* menemukan bahwa adanya sebuah kepentingan bagi negara kaya untuk membantu mengurangi kemiskinan secara global. Negara berkembang telah dianggap sebagai salah satu penyebab utama dari kerusakan lingkungan. Melalui hal ini negara donor memberikan bantuan luar negerinya melalui pembangunan berkelanjutan.[37]

4. Motif moral dan kemanusiaan

Adanya alasan moral dan kemanusiaan untuk pemberian bantuan luar negeri didasarkan pada prinsip dan nilai bahwa terdapat sebuah kewajiban bagi manusia untuk menolong manusia lain yang kurang beruntung. Pemikiran ini kemudian juga berkembang di dalam level negara dimana negara kaya memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada negara miskin. Tidak jarang adanya tanggung jawab moral

[37] Martinussen dan Pedersen. *Op. Cit.* Hal. 16

yang ada juga dikombinasikan dengan *self – interest* yang dimiliki oleh negara pendonor.[38]

Para pendonor sering kali menegaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada negara penerima di dorong atas dasar prinsip kepedulian untuk mendukung pembangunan. Namun bagaimanapun akan terdapat perbedaan diantara apa yang diungkapkan oleh pendonor terkait motif mereka dan apa yang terjadi sebenarnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Martinussen dan Pedersen yang menyatakan bahwa meskipun pemberian bantuan luar negeri ditekankan atas dasar nilai moral dan kewajiban namun pemberian *development assistance* atau bantuan pengembangan teknis kepada negara miskin akan memberikan keuntungan bagi negara kaya dalam jangka waktu lama.[39] Pengertian ini merujuk pada sebuah fakta bahwa antara negara utara dan selatan memiliki saling ketergantungan dalam hal transfer sumber daya alam. Negara selatan akan memiliki keuntungan besar atas transfer sumber daya ke negara utara dan hal ini juga akan menguntungkan negara utara yang akan membawa keberlanjutan industry di negara kaya.

Hubungan antara tanggung jawab moral dan *self – interst* yang kemudian disebut sebagai *human internasionalism*.[40] Olav Stokke telah mengkarakteristikan *human internasionalitation* sebagai sebuah penerimaan universal dari tanggung jawab untuk mengurangi angka kemiskinan atau sering disebut dengan *reduce poverty* di tingkat global

[38] Ibid. Hal. 15
[39] Ibid. Hal. 9
[40] Martinussen dan Pedersen. *Op. Cit*. Hal. 10

dapat mempromosikan negara donor untuk mencapai *national interest* dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.[41]

Untuk mempermudah memahami bagaimana motif yang tersembunyi dibalik adanya sebuah bantuan luar negeri Martinussen dan Pedersen membuat sebuah skema yang menggambarkan keempat motif dibawah ini:

Gambar 2.2 Motif utama dalam bantuan pembangunan

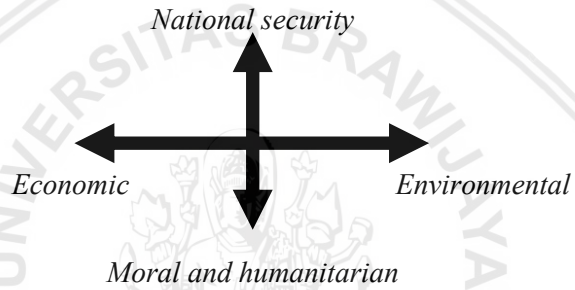

Sumber: Skema motif dan kepentingan donor Martinussen dan Pedersen

2.3 Operasionalisasi Konsep

Untuk menjelaskan operasionalisasi konsep *motives and interest* milik Martinussen dan Pedersen akan diteliti kembali melalui motif yang dimiliki Australia dalam pemberian bantuan terhadap Indonesia melalui kerja sama pendidikan melalui ESSP pada tahun 2011 – 2014. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan konsep tersebut terhadap negara Australia sebagai negara donor berdasarkan empat indikator yaitu motif politik dan kemanan nasional, motif ekonomi, motif lingkungan, serta motif moral dan kemanusiaan.

1. Motif politik dan keamanan nasional

[41] Ibid. Hal. 11

Menurut Martinussen dan Pedersen, motif politik dan kemanan nasional atau disebut dengan *national security* memiliki oleh memiliki tiga indikator yaitu adanya *peace and security*, *diplomacy power, diplomatic relation*.

Dalam indikator *peace and security* menjelaskan mengenai bagaimana bantuan yang diberikan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam bidang keamanan. Untuk bantuan luar negeri yang bersifat militer akan berbentuk sebuah aliansi militer atau politik. Namun hal ini sangat jarang terjadi karena pemberian bantuan luar negeri yang dilakukan oleh negara donor untuk bantuan luar negeri di dalam kerja sama pembangunan.[42] Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya akan digunakan melalui pemberian bantuan Australia melalui kerjasama pendidikan terhadap Indonesia melalui ESSP.

Indikator kedua adalah *diplomatic power* yang merupakan kepentingan politik negara donor untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan secara diplomatis di sistem negara internasional. Dalam hal ini bantuan luar negeri akan berperan dalam membantu Australia untuk mendapatkan kekuatan diplomatik di dunia internasional melalui negara Indonesia melalui kerja sama pendidikan melalui ESSP berdasarkan dari *foreign policy* Australia.

Indikator kegita adalah *diplomatic relation* yang akan menjelaskan bahwa bantuan luar negeri digunakan sebagai salah satu cara bagi

[42] Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book. Hal. 12

negara donor untuk memperkuat hubungan diplomatiknya terhadap negara penerima. Terjaganya hubungan kedua negara akan dilihat melalui negara Australia terhadap Indonesia melalui pemberian bantuan dalam kerjasama pendidikan di ESSP yang akan dilihat melalui hubungan kerjasama kedua negara tersebut yang disesuaikan dengan *national interest* dari Australia dalam tertuang dalam *foreign policy*.

2. Motif ekonomi

Motif ekonomi yang mendasari pemberian bantuan Australia melalui ESSP dapat dilihat dari tiga indikator yaitu *trade relation*, *investment* dan *access*.[43]

Dalam indikator *trade relations* bila menggunakan konsep dari Martinnussen dan Pedersen dapat dilihat dari adanya peningkatan nilai ekspor dan impor dari Australia ke Indonesia melalui barang atau jasa dari negara Australia terhadap negara Indonesia dalam pemberian bantuan melalui ESSP yang terdapat dalam *foreign policy* Australia.

Untuk indikator *investment* dapat diukur melalui adanya investasi dari Australia dalam pemberian bantuan ESSP terhadap Indonesia dalam bidang pendidikan yang tidak hanya memberi keuntungan bagi negara Australia namun bagi negara Indonesia dapat meningkatkan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi dalam pengurangan angka kemiskinan melalui pemberian bantuan program ESSP untuk jangka

[43] Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book. Hal. 12

panjang yang berhubungan dengan peningkatkan hubungan kerjasama Australia terhadap Indonesia berdasarkan pada kebijakan luar negeri Australia yang memandang negara Indonesia merupakan salah satu negara penting berdasarkan dari *national interest* Australia melalui *foreign policy*.

Sedangkan untuk indikator *access* dapat dilihat dari Australia untuk mendapatkan akses dalam sumber daya yang dimiliki oleh negara Indonesia melalui pemberian bantuan program ESSP. Dengan adanya pemberian bantuan tersebut, negara Australia dapat mendapatkan hak aksesk terhadap sumber daya yang dimiliki oleh negara Indonesia berdasarkan pada *national interest* yang terdapat dalam *foreign policy* milik Australia.

3. Motif lingkungan

Adanya motif lingkungan oleh Australia dapat ditunjukkan dengan dua indikator yakni *environmental improvement* dan *international responsibility*.[44]

Untuk indikator *environmental improvement* dapat dibuktikan dengan adanya upaya dari Australia di Indonesia untuk membantu mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan yang sedang terjadi. Upaya dari Australia untuk membantu Indonesia dalam upaya memperbaiki lingkungan akan berkontribusi untuk mencegah dampak lintas batas atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia

[44] Martinussen dan Pedersen. *Op.Cit*. Hal. 15

terhadap lingkungan di Australia. Dalam bidang lingkungan merupakan salah satu cara bagi negara Australia untuk menangani permasalahan lingkungan global di luar batas wilayah negaranya berdasarkan dari *national interest* yang dibuat melalui *foreign policy*.

Indikator *international responsibility* diartikan sebagai tindakan dari negara donor yang dalam hal ini Australia menunjukkan tanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan yang sedang terjadi di internasional. Menurut Martinussen dan Pedersen mengatakan bahwa negara donor memiliki kewajiban untuk membantu negara penerima dalam menerapkan kebijakan lingkungannya dalam menghadapi isu lingkungan bersama. Melalui penjelasan ini bila dilihat melalui negara Australia terhadap negara Indonesia dalam pemberian bantuan ESSP akan melihat *national interest* memiliki kepentingan dalam mendapatkan pencitraan di mata internasional melalui peningkatkan pendidikan dalam memperbaiki lingkungan di Indonesia.

4. Motif moral dan kemanusiaan

Indikator pertama dari motif moral dan kemanusiaan ini dapat diukur dari adanya upaya negara donor dalam mengurangi tingkat kemiskinan atau sering disebut dengan *reduce poverty* yang berada di negara penerima.[45] Upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut dapat diukur melalui pelaksanaan program ESSP melalui meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia berdasarkan program

[45] Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book. Hal. 10

pendidikan Indonesia yang telah dibuat melalui *Renstra* oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan adanya pelaksanaan program ESSP dibidang pendidikan, Australia mengharapkan adanya *feedback* dari negara Indonesia dilakukan oleh negara Australia seperti pengakuan dari dunia internasional yang mempunyai tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di negara berkembang dan dapat member berdasarkan dari *national interest* melalui *foreign policy* dalam

Untuk mempermudah memahami operasionalisasi konsep diatas, penulis membuat sebuah table operasionalisasi sebagai berikut:

Tabel 2.1 Operasionalisasi Konsep Motive and Interests

Konsep	**Variabel**	**Indikator**	**Operasionalisasi**
Motif dan Kepentingan Bantuan Luar Negeri	Motif politik dan keamanan nasional	*Peace and Security*	Adanya upaya Australia untuk menjamin kemananan nasional melalui ESSP
		Diplomatic Power	Adanya dukungan politik dari internasional yang di dapat Australia melalui pemberian bantuan terhadap Indonesia melalui kerja sama pendidikan melalui ESSP

		Diplomatic Relation	Adanya upaya Australia untuk meningkatkan hubungan kerja sama terhadap Indonesia melalui pemberian bantuan melalui ESSP
	Motif ekonomi	*Trade*	Adanya peningkatan ekspor dan impor produk baik barang atau jasa dari Australia ke Indonesia melalui pemberian bantuan melalui ESSP
		Investment	Adanya investasi baru atau peningkatan investasi yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia melalui pemberian bantuan ESSP
		Access	Adanya akses yang dimiliki Australia terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia atas pemberian bantuan oleh Australia
	Motif lingkungan	*Enviromental Improvement*	Adanya upaya perbaikan lingkungan di Indonesia untuk mengurangi permasalahan lingkungan melalui lintas batas

			negara terhadap Australia
		International Responsibility	Adanya upaya Australia untuk menunjukkan sikap peduli terhadap masalah lingkungan global
	Motif Moral dan Kemanusiaan	*Reducing Poverty*	Adanya program bantuan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan politik

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2.4. Kerangka Pemikirian Motif dan Kepentingan Australia melalui kerja sama pendidikan melalui *ESSP* tahun 2010-2014

Gambar 2.3 Alur Pemikiran

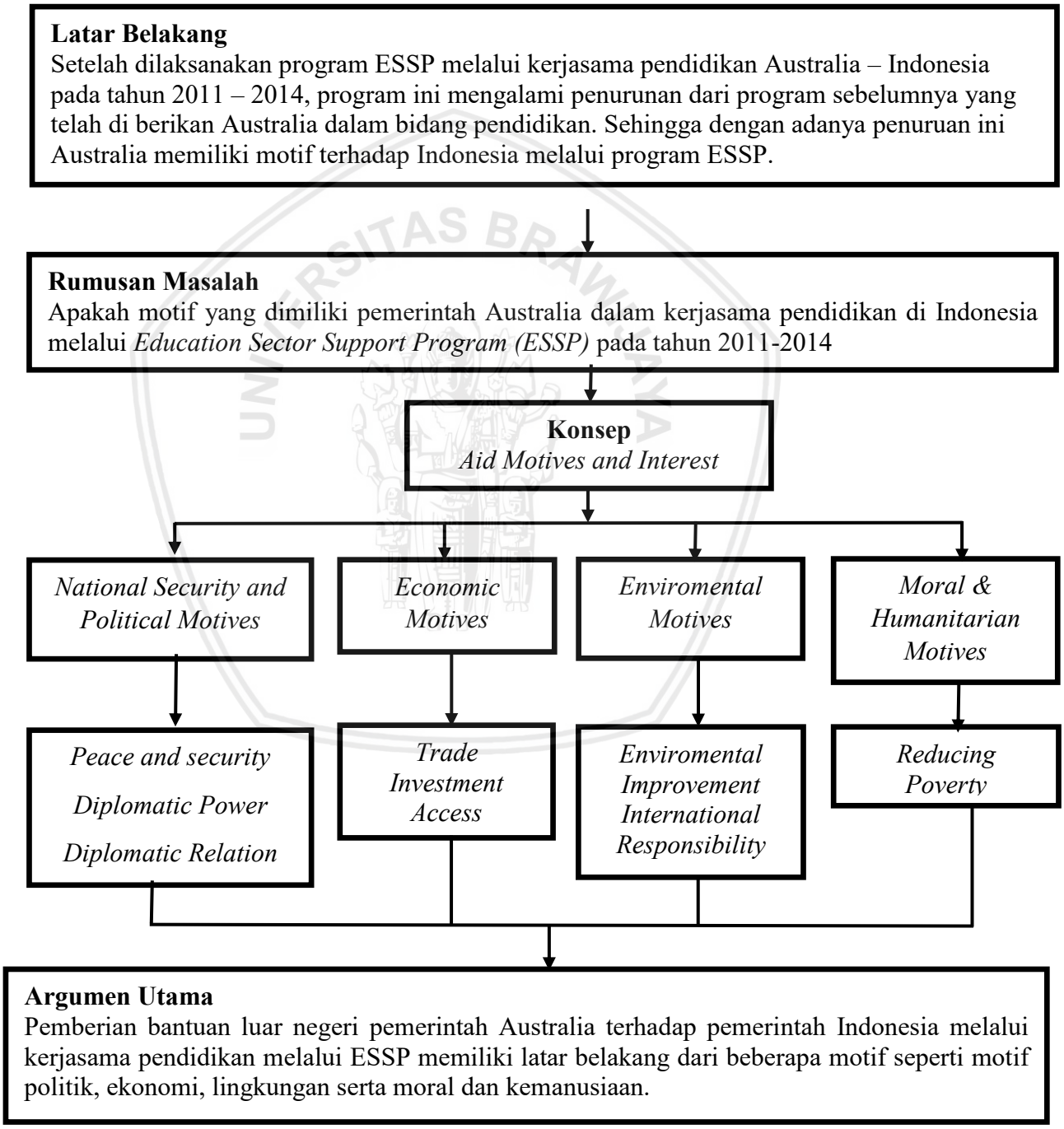

2.5 Argumen Utama

Pemberian bantuan luar negeri pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia melalui kerja sama pendidikan melalui ESSP memiliki latar belakang dari beberapa motif seperti motif politik, ekonomi, lingkungan serta moral dan kemanusiaan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini menggambarkan suatu peristiwa melalui gambaran secara sistematis dan berdasarkan fakta yang ada atau sering disebut dengan faktual.[1] Alasan penulis menggunakan penelitian deskriptif karena bantuk dari penelitian ini ditujukan untuk menjabarkan bagaimana motif suatu negara dalam pemberiannya dalam kasus Australia kepada Indonesia melalui kerja sama pendidikan melalui *Education Sector Support Program* (ESSP). Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana hubungan antar aktor negara dalam hubungan kerja sama bilateral pendidikan yang kemudian akan dijabarkan melalui konsep milik Martinussen dan Pedersen. Sedangkan untuk level analisis yang akan digunakan dalam penelitian adalah *government*.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang meluas dan kompleks, maka dalam pembahasan pada karya tulis ini penulis hanya membahas mengenai motif Australia dalam memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia melalui kerja sama bilateral dalam bidang pendidikan melalui ESSP pada tahun 2011 – 2014. Adapun rentang waktu yang penulis pilih dalam penelitian ini yaitu tahun 2011 –

[1] Mochtar Mas'oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta, LP3ES). Hal. 62

2014 karena pada waktu ini penulis menemukan adanya sebuah fenomena yang dapat menjadi acuan penelitian.

Tahun 2011 menjadi batas awal penelitian karena pada tahun tersebut pemberian bantuan pendidikan Australia melalui ESSP pertama kali masuk ke Indonesia. Dan pada tahun 2014 sebagai batas penelitian karena pada tahun 2014 merupakan akhir dari pemberian bantuan pendidikan melalui ESSP.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi pustaka. Data yang akan digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melaui berbagai refrensi baik dalam bentuk online seperti *e-book*, *website*, dan sumber lainnya seperti buku, artikel, jurnal dan sebagainya.

3.4 Teknik Analisa Data

Teknik Analisa yang digunakan oleh penulis bersifat kualitatif yang nantinya penulis akan mengumpulkan berbagai data dari refrensi yang ada, kemudian dianalisis menggunakan teori dan variabel yang telah disebutkan sebelumnya di operasionalisasi konsep dan akan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dari penelitan tersebut.

3.5 Sistematika Penulisan

Penulis dalam melakukan kegiatan penelitian ini akan menjelaskannya melalui masing-masing bab yaitu:

- Pada bab pertama akan berisikan mengenai latar belakang masalah beserta dengan penjelasan dalam urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
- Pada bab kedua akan memuat mengenai kajian studi terdahulu yang akan digunakan sebagai landasan bagi penulis dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, kajian konseptual, kerangka pemikiran, serta hipotesa penelitian.
- Pada bab ketiga akan menjelaskan mengenai jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data yang akan digunakan, teknik analisa dan sistematika penulisan.
- Pada bab keempat akan dijelaskan mengenai gambaran umum mengenai bantuan pemerintah Australia kepada pemerintah Indonesia melalui kerja sama pendidikan melalui program ESSP. Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan sejarah kerja sama antara Indonesia dengan Australia di bidang pendidikan, Bantuan pendidikan Australia terdahap Indonesia melalui AIBEP dan selanjutnya akan membahas mengenai Program bantuan pendidikan yang bernama ESSP.
- Pada bab kelima akan diisi dengan hasil dari penelitian yaitu bagaimana motif bantuan luar negeri Australia melalui ESSP kepada Indonesia yang implementasikan menggunakan konsep motf dan kepentingan negara donor milik Martinussen dan Pedersen. Bab ini akan dibagi melalui beberapa sub – bab dimana tiap sub – bab akan menjelaskan beberapa

variabel motif bantuan milik Martinussen dan Pedersen. Pada bab terakhir akan diisi dengan pernyataan singkat atau rangkuman dari hasil penelitian penulis.

- Selain itu pada bab keenam penulis akan menarik kesimpulan mengenai motif bantuan pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia dalam kerja sama pendidikan melalui ESSP. Kemudian penulis akan memberikan saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dengan tujuan untuk mengembangkan, menindak lanjuti dan menerapkan hasil penelitian baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Hasil penelitian yang diperoleh bisa saja semakin memperkuat hipotesis penulis atau bahkan menjatuhkan hipotesis yang sebelumnya dibuat oleh penulis.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Dalam menganalisis motif Australia terkait pemberian bantuan dalam kerja sama pendidikan terhadap Indonesia melalui ESSP pada tahun 2011 – 2014 terdapat kata kunci pembahasan. Beberapa poin utama yang digunakan dalam menganalisisnya yaitu bagaimana politik luar negeri Australia dan bagaimana sejarah pemberian bantuan Australia terhadap Indonesia dalam kerja sama pendidikan melalui ESSP.

Penulis melihat bahwa hal ini mampu menjelaskan bagaimana kerja sama dalam bidang pendidikan tersebut terjadi sebagai kerja sama antara Australia dengan Indonesia menjadi salah satu kata kunci yang mampu memberikan informasi mengenai motif Australia dalam pemberian bantuan pendidikan melalui kerjasama terhadap Indonesia dalam ESSP.

1.1 *Foreign policy* Australia

Politik luar negeri merupakan salah satu bagian dari setiap negara dalam sistem hubungan internasional yang dibuat melalui *state actor* maupun *non – state actor*.[1] Hal ini dilakukan berdasarkan dari kepentingan nasional negara dalam mengahadapi negara lain atau organisasi internasional lainnya dalam mencapai

[1] James. N. Rosenau, Gravin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press. Hal. 15

tujuan melalui berbagai macam kerjasama seperti kerjasama bilateral, multilateral, regional, dan sebagainya.[2]

Seperti halnya dengan negara Australia melalui politik luar negerinya yang dikeluarkan oleh Perdana Mentri Australia, Julia Gillard melalui *white paper* yang berjudul *Australia in the Asian Century* memiliki tujuan yaitu *"mengamankan negara Australia sebagai negara yang lebih makmur dan tangguh dari dalam dan luar negeri Australia dan terbuka untuk dunia"* yang menjadikannya sebagai visi dari kebijakan luar negeri Australia.[3]

Dalam mencapai tujuan Australia berdasarkan dari visi kebijakan luar negerinya memiliki lima indikator yang harus dipenuhi yaitu:[4]

1. Meningkatkan keterampilan dan pendidikan, inovasi, infrastuktur, pembaharuan pajak dan pembaharuan regulasi dengan negara – negara mitra
2. Membangun koneksi dan kemitraan yang lebih kuat di kawasan sekitar
3. Membuka pasar baru bagi perusahan – perusahan Australia di kawasan Asia dalam bidang perdagangan, investasi, dan kemitraan dengan memanfaatkan peluang yang ada
4. Meningkatkan keamanan yang berkelanjutan di daerah kawasan melalui kerja sama bilateral, multilateral, dan regional serta memperkuat aliansi – aliansi

---

[2] James N. Rosenau. 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press. Hal. 171 – 173.
[3] *Australia In the Asian Century White Paper*. Oktorber 2012. Departemen of Defence and Strategy. http://www.defence.gov.au/whitepaper/2013/docs/australia_in_the_asian_century_white_paper.pdf. Diakses pada 20 Juli 2019. Hal. 1
[4] Ibid. Hal. 2

yang sudah ada terhadap negara besar seperti Amerika Serikat dan negara China

5. Meningkatkan citra positif terhadap negara kawasan di Asia dalam bidang sosial dan budaya

Dengan adanya beberapa indikator yang ada, pemerintah Australia dalam melakukan kerja sama luar negeri khususnya terhadap negara di kawasan Asia melihat bahwa negara kawasan di Asia memiliki keuntungan bagi negara Australia dalam bidang kemana, ekonomi, sosial, dan budaya.

5.1 Sejarah pemberian bantuan Australia – Indonesia melalui ESSP

Berdasarkan catatan perjalananan dari Kemendikbud, pemberian bantuan Australia pertama kali dilakukan melalui *Australia Indonesia Basic Education Program* (AIBEP) sebelum program *Education Sector Support Program* (ESSP) yang dimulai pada bulan April 2006 dan berkahir pada Juni 2010 yang dibuat berdasarkan pada Rencana Strategis Pendidikan Nasional (Renstra) dari pemerintah Indonesia melalui kemendikbud beserta dengan Kementrian Agama (Kemenag) dalam meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia.[5] Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses yang adil kepada masyarakat melalui layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan dikelola dengan baik di daerah-daerah tertinggal yang kurang akan pendidikan.

[5] Ibid.

Berdasarkan dari *Independent Completion Report* (ICR) melalui situs resminya, program ini memberikan bantuan sebesar AUD387.6 miliar dengan masing-masing pemberiannya melalui bantuan pinjaman *(loan)* dengan nama program *Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development* (AIPRD) yang sebesar A$200 miliyar dan bantuan hibah *(grant)* melalui program *Australia Indonesia Development Cooperation Program* (AIDCP) yang sebesar A$187.6 miliyar. Dalam pelaksanaan program AIBEP memiliki 4 tujuan dalam yaitu: [6]

i. Memperluas akses pendidikan yang adil dengan mendirikan 2000 sekolah yaitu SD, SMP, SMA, dan Madrasah dan menyediakan 330,000 untuk program formal dan informal di sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pelajar di SMP
ii. Meningkatkan kualitas dan efisiensi pendidikan melalui peningkatan profesionalitas guru, murid dalam melakukan kegiatan pendidikan
iii. Meningkatkan kapasitas dalam perencanaan, pemantauan dan layanan pendidikan di Indonesia
iv. Meningkatkan kinerja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beserta dengan Departemen Agama dalam melaksanakan program pendidikan dasar khususnya pendidikan bagi kaum miskin di daerah-daerah terpencil yang kurang akan pendidikan serta pemantauan dan evaluasi program yang telah dilaksanakan

[6] *Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) Independent Completion Report (ICR)*. Mei 2010. https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/aibep-executive-summary.pdf. Diakses pada tanggal 5 Mei 2019. Hal. I

Berdasarkan dari arsip Kemendikbud sejak tahun 2006 sampai dengan bulan Desemberi 2010 program AIBEP telah membangun 2015 sekolah dengan rinciannya yaitu 755 Unit Sekolah Baru (USB) dan 1240 Sekolah Satu Atap (SATAP) dengan total sebesar $210.000.000.[7] Kemendikbud dalam melakukan pelaksanaan program AIBEP, terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang ikut dalam program tersebut, yaitu:

Tabel 4.1 Pesebaran Sekolah di Indonesia melalui AIBEP

No	Provinsi	Jenis Sekolah	SATAP	USB
1	Bali	SMPN		11
2	Banten	MT-PSA	19	
3	Gorontalo	SDN dan SMPN	11	23
4	Jawa Barat	MT-PSA	108	
5	Jawa Tengah	MT-PSA	55	
6	Jawa Timur	MT-PSA	144	
7	Kalimantan Barat	SDN dan SMPN	36	129
8	Kalimantan Selatan	SDN dan SMPN	9	22
		MT-PSA	19	
9	Kalimantan Tengah	SDN dan SMPN	28	55
10	Lampung	MT-PSA	68	
11	Maluku	SDN dan SMPN	51	17
12	Maluku Utara	SDN dan SMPN	37	24
13	Nusa Tenggara Barat	SDN dan SMPN	63	65
		MT-PSA	20	
14	Nusa Tenggara Timur	SDN dan SMPN	174	104
15	Sulawesi Barat	SDN dan SMPN	3	34
16	Sulawesi Selatan	SDN dan SMPN	133	126
		MT-PSA		
17	Sulawesi Tengah	SDN dan SMPN	63	65
18	Sulawesi Tenggara	SDN dan SMPN	44	69
19	Sulawesi Utara	SDN dan SMPN	83	31

[7]*Arsip Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri*. 2016.

20	Sumatera Selatan	MT-PSA	30	
	Total		1240	775

Sumber: Arsip Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Birp Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri. 2016

Sebagai lanjutan dari program AIBEP dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia yang berdasarkan pada *foreign policy*, Pemerintah Australia melanjutkan kerja sama pendidikan melalui pemberian bantuan yang bernama *Education Sector Support Porgram* (ESSP) pada tahun 2011 sampai pada tahun 2015.

Education Sector Support Porgram (ESSP) adalah salah satu bentuk kerja sama multilateral yang dilakukan oleh pemerintah Australia dengan beberapa negara donor lainnya seperti *European Union* (EU), *Australia International Development Assistance Program* (AusAID), dan *Asian Development Bank* (ADB) di bidang pendidikan terhadap pemerintahan Indonesia.[8] Program ini merupakan salah satu program lanjutan dari bantuan sebelumnya yaitu *Australian Indonesia Basic Educatoion Partnership* (AIBEP) yang dibuat pada bulan April 2006 dan berkahir pada Juni 2010. Pada yang bulan Mei 2009 program ESSP dirancang berdasarkan kesepaktan bersama antara pemerintah Indonesia sebagai negara penerima dengan pemerintah Australia, EU, dan ADB.[9] Dan pada bulan Oktober 2008, rancangan kerja sama multilateral ini dilakukan dan pada bulan Oktober 2010 draft kerja sama multilateral ini berhasil dibuat dan disetujui oleh

[8] *Australia's Education Partnership with Indonesia (A Contribution to The Government of Indonesia's) Education Sector Support Program* (Final). Okober 2010. Kemitraan Australia Indonesia. Hal. 14

[9] *Asian Development Bank* (ADB). *Technical Assistance Report. Republic of Indonesia: Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (Confinanced by the Government of Australia and the European Union)*. Mei 2010. https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/63665/43273-01-ino-tar.pdf. Diakses pada tanggal 5 Juni 2019. Hal. 1

pemerintah Australia melalui lembaga AusAID dan *European Union* (EU) dan *Asian Development Bank* (ADB) yang kemudian program ini ditujukan kepada pemerintah Indonesia.

Program ESSP dibuat untuk memberikan kontribusi dalam *Education For All* (EFA), *educated – related Millenium Development Goals* (MDGs) dan meningkatkan kompetitif perekonomian di tingat kawasan dan global.[10] Dan untuk pemberian bantuan dalam program ESSP memiliki beberapa dana alokasi yang diterima oleh pemerintah Indonesia yaitu sebesar AUD987 juta selama lima tahun dengan dimulai pada bulan Juli 2010 dengan rincian anggaranya yaitu AUD 500 juta yang berasal dari pemerintah Australia, EUR 345 juta dari EU (bila di konversikan ke dalam mata uang Australia berjumlah AUD486.6 juta) dan USD2.2 juta (AUD2.3 juta) dari ADB yang diberikan dalam *technical assistance* dalam bentuk dana hibah kepada negara *partnership* yaitu negara Indonesia.[11]

Dengan melihat hal ini Australia sebagai salah satu negara donor yang memberikan bantuan terhadap negara Indonesia melalui ESSP menjadikan salah satu bagian dari *partnership* dengan instansi internasional lain seperti EU dan ADB yang ikut serta memberikan bantuan dalam bentuk *development assistance* terhadap pendidikan di Indonesia.

[10] Ibid.
[11] Ibid. Hal. 2

Pemerintah Australia dalam mendistribusikan bantuan kepada pemerintah Indonesia berdasarkan dari draft final Australia – Indonesia memiliki empat indikator yang ingin dicapai, yaitu:[12]

1. Meningkatkan pendidikan sekolah dasar dan menengah dalam pembangunanya dengan berjumlah AUD222 juta yang akan diberikan kepada pemerintah Indonesia
2. Pelatihan guru-guru dan staff sekolah tingkat distrik dana bantuan sebesar AUD182 juta (anggaran ini dikhususkan untuk mengembangkan pendidikan secara teknis).
3. Meningkatkan akreditasi sekolah Madrasah dengan dana bantuan sebesar AUD47 juta dalam bentuk hibah dan *technical assistance* dalam pelaksanaanya
4. Pengembangan kapasitas kemitraan melalui *Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP) dengan dana bantuan sebesar AUD25 juta.

Sedangkan untuk kontribusi EU dalam memberikan dana bantuan melalui Renstra dan akan diberikan secara bertahap berdasarkan kerangka kerja yang akan dirangkum dalam *ESSP Joint Results Framework targets* dan untuk ADB akan memanajemen pelaksanaanya melalui *multi – donor* melalui ACDP dengan dana sebesar USD100 juta untuk diberikan kepada peningkatan kualitas sekolah Madrasah dan memberikan dana bantuan sebesar USD230 juta untuk membantu

---

[12] *Performance Oversight and Monitoring (POM) Education Partnership - Independent Completion Report (ICR)*. Desember 2016. https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/indonesia-education-partnership-completion-report.pdf. Diakses pada tanggal 1 Mei 2019

polythecnics.[13] Hal ini dilakukan dalam menganalisis kemajuan – kemajuan yang telah dibuat oleh negara Indonesia dalam pelaksanaan ESSP dalam meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia melalui kesetaraan *gender,* program belajar sembilan tahun yang dimulai dari SD, SMP, SMA, dan Madrasah, serta meningkatkan kualitas – kualitas guru di Indonesia.

Berdasarkan hasil dari evaluasi pelaksanaan ESSP berdasarkan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui dari Kemitraan Pendidikan Australia – Indonesia (KPAI) pada tahun 2012 – 2015 ada beberapa perkembangan yang telah dilakukan oleh Kemendikbud dalam pelaksanaan program AIBEP melalui keempat komponen yang diatas. Jumlah sekolah – sekolah yang sudah dilakukan kemendikbud dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah sekolah dalam melaksanakan program ESSP

No.	Tahun	USB	SATAP	JUMLAH
1	2012	115	631	746
2	2013	166	150	316
3	2014	131	107	238
4	2015	70	80	150
TOTAL		482	968	1450

Sumber: Arsip Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri.

Berdasarkan dari laporan kemendikbud dapat melihat bahwa program pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh Indonesia di bidang pendidikan berdasarkan dari kerangka kerja yang sudah dibuat menggambarkan bahwa setiap tahunnya, perkembangan mengalami pengurangan dari jumlah tahun sebelumnya.

[13] *Australia's Education Partnership with Indonesia (A Contribution to The Government of Indonesia's) Education Sector Support Program* (Final). Okober 2010. Kemitraan Australia Indonesia. Hal. 20.

Sehingga pendidikan yang telah dibuat dalam rancangan *ESSP* antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia terlihat tidak berjalan dengan baik.

Pemerintah Indonesia dalam menerima bantuan dari para donor mempunyai alur kebijakan yang tentunya saling berkaitan antara satu sama lain dalam mencapai kerja sama yang telah dibuat bersama yang dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.

Gambar 4.1 Indonesia's policy Framework for the ESSP

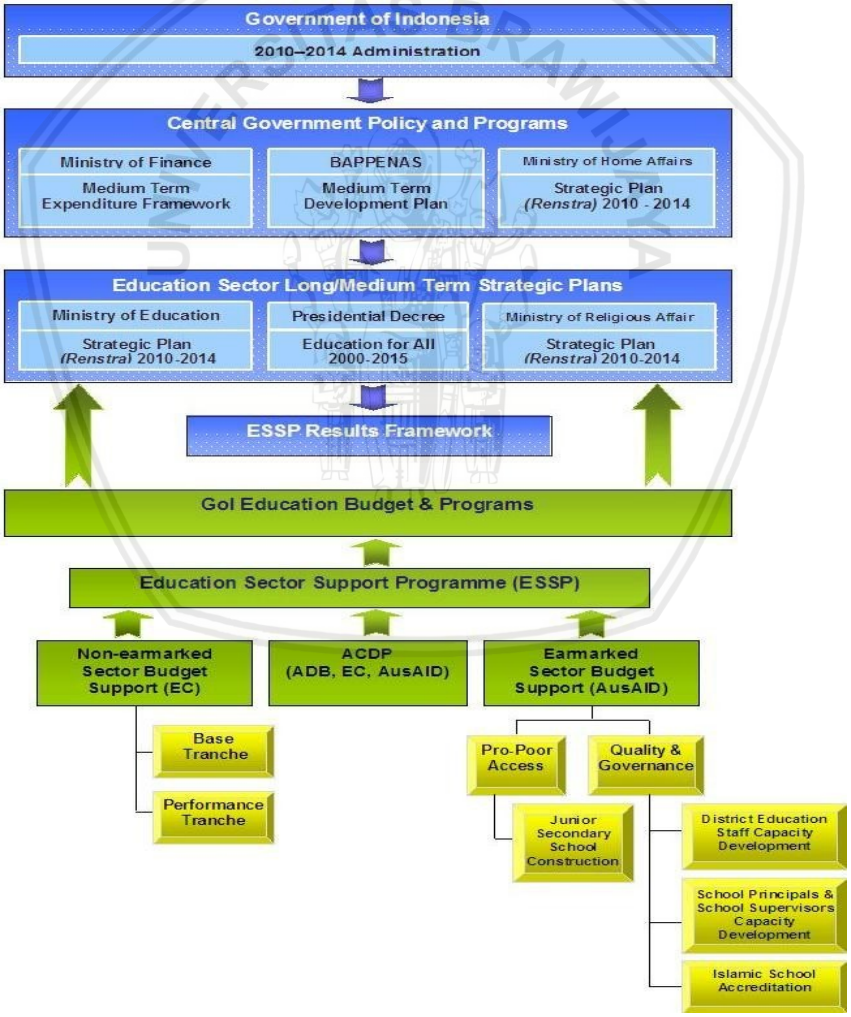

Sumber: *Australia's Education Partnership with Indonesia (A Contribution to the Government of Indonesia's) Education Sector Support Program*

Berdasarkan dari gambar sebelumnya pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia melihat bahwa beberapa instansi terkait yang ada di pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementian Agama (Kemenag), Kementrian Keuangan, Badan Perencanaan Nasional (BAPENAS) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mempunyai peran penting dalam melaksanakan program ESSP yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Australia beserta dengan donor lainnya yaitu ADB dan EU dalam membantu pendidikan yang ada di Indonesia. Dan untuk dari pemerintah Australia beserta dengan donor lainnya dalam melaksanakan program ESSP di negara Indonesia diwakilkan oleh ACDP yang mempunyai peran untuk melakukan evaluasi program yang telah dilaksanakan terhadap pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan melalui ESSP.

Berdasarkan dari *Subsdiary Arrangement Between the Government of The Republic of Indonesia and the Governemnt of Australia Relating to Australia's Education Partnership with Indonesia Contribution to the Education Sector Support Program*, bantuan tersebut pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 14 Juni 2011 berjumlah AUD500 juta dengan dengan rinciannya yaitu:[14]

1. *School construsction* dengan jumlah sebesar AUD215.7 juta
2. *School and District Management* dengan jumlahnya sebesar AUD188.3 juta.
3. *Islamic School Accreditation* dengan jumlah sebesar AUD47 juta.

[14] *Subsdiary Arrangment Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia Relating to Australia's Education Partnership with Indonnesia Contribution to the Education Sector Support Program.* June 2011. Kemendikbud. Hal. 1 – 2.

4. *Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP) dengan jumlah sebesar AUD25 juta
5. *Other Advisory Services* dengan jumlahnya sebesar AUD24 juta

Namun bila dilihat melalui draft final yang telah dibuat antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia sebelumnya mengalami penuruan dari yang sudah disepakati sebelumnya melalui beberapa indikator yang telah disepakati. Sehingga dalam pelaksanaanya mengalami kendala hingga pada tahun 2014 yang dimana program ESSP berakhir.[15]

Namun dalam menilai pelaksanaan program ESSP yang dilakukan antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh ACDP melalui *Performance Oversight and Monitoring (POM) Education Partnership - Independent Completion Report (ICR)* yang dikeluarkan pada bulan Desember 2016 melihat adanya beberapa indikator yang digunakan untuk melihat pelaksanaan ESSP yaitu:[16]

1. Relevance

Berdasarkan pada relvansi pelaksanaan ESSP, pemerintah Australia dan Indonesia memiliki pemikiran yang sama dalam membangun pendidikan di Indonesia. Namun dalam dalam relevansi internal, pemerintah Australia melalui tim ACDP memiliki hambatan dalam melihat perkembangan program ESSP. Hal ini dinilai karena permasalahan politik yang menurut pemerintah Indonesia ACDP

[15] *Performance Oversight and Monitoring (POM) Education Partnership - Independent Completion Report (ICR)*. Desember 2016. https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/indonesia-education-partnership-completion-report.pdf. Diakses pada tanggal 1 Mei 2019. Hal. 19
[16] Ibid

merupakan sebagai salah satu alat politik negara donor khususnya pada negara Australia dalam bidang pendidikan.[17]

Sehingga menurut penulis melihat bahwa relevansi pelaksanaan program bantuan yang dilakukan oleh pemerintah Australia melalui ACDP terhadap Indonesia dalam kerja sama pendidikan melalui ESSP tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat di dalam ESSP.

2. Efficiency

Berdasrkan pada efisiensi pelaksanaan ESSP, ACDP dalam melakukan evaluasi kegiatan ESSP mengalami permasalahan kembali dengan pergantian salah satu pegawai atau staff dari pemerintah Indonesia yang mengakibatkan penundaan rencana kerja ACDP. Sehingga menurut penulis hal ini menjadi kegagalan bagi ACDP untuk menilai efisiensi ESSP dalam implementasinya.[18]

Dengan adanya hal seperti ini pemerintah Australia melalui ACDP untuk melakukan evaluasi terhadap ESSP di negara Indonesia bila dilihat dari efisiensi maka pelaksanaan ESSP di negara Indonesia tidak berjalan secara efisien dikarenakan mengalami kendala yang ditemukan oleh ACDP dalam melakukan evaluasi terhadap Indonesia terutama dalam hal pergantian staff yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengakibatkan terjadinya penundaan rencana kerja yang telah di buat oleh ACDP yang merupakan salah satu tim yang mewakili dari negara Australia.

---

[17] *Performance Oversight and Monitoring (POM) Education Partnership - Independent Completion Report (ICR)*. Desember 2016. https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/indonesia-education-partnership-completion-report.pdf. Diakses pada tanggal 1 Mei 2019. Hal. 20

[18] Ibid. Hal. 21

3. *Effectiveness*

Kemudian berdasarkan dari efektivitas pelaksanaan ESSP, berdasarkan hasil laporan dari ACDP dalam menilai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Australia dinilai sangat bagus karena pada dua tahun terakhir ditemukan peningkatan penawaran produk dan meningkatkan komunikasi dalam bidang pendidikan. dan ACDP mendukung kebijakan *knowledge to policy process* yang kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia melalui pemerintahan khususnya kemendikbud selaku pelaksana program ESSP dari negara Indonesia. [19]

Dalam melihat hal ini maka penulis menarik kesimpulan bahwa ACDP dalam mengevaluasi hasil kerja melalui efektivitas pelaksanaan ESSP di Indonesia berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari ACDP selaku perwakilan pemerintah Australia untuk menudukung salah satu program turunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melaui kemendibud dalam meningkatkan pendidikan yang sesuai dengan ketentutan dan aturan yang ada di ESSP.

4. *Sustanibility*

Dalam hal keberlanjutan kerja sama pendidikan melalui ESSP, ACDP melihat bahwa pelaksanaan program pendidikan melalui ESSP dinilai untuk tidak dilanjutkan kembali dikarenakan dinilai bahwa tidak adanya manfaat yang jelas bagi ACDP dan kurangnya informasi dalam pemberitahuan kepada ACDP

---

[19] *Performance Oversight and Monitoring (POM) Education Partnership - Independent Completion Report (ICR)*. Desember 2016. https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/indonesia-education-partnership-completion-report.pdf. Diakses pada tanggal 1 Mei 2019. Hal. 21

menjadi salah satu faktor untuk tidak melanjutkan kerja sama ini untuk kedepannya.[20]

Berdasarkan dari hasil penjalasan yang telah dilakukan oleh ACDP ini dapat dilihat bahwa pemberian bantuan yang dilakukan oleh negara Australia terhadap Indonesia dalam program ESSP di Indonesia melalui *sustanibility* menyimpulkan bahwa pelaksanaan ESSP di Indonesia dalam bidang pendidikan mengalami kegagalan dikarenakan dinilai tidak memiliki manfaat bagi ACDP untuk melanjutkan kembali.

Dengan adanya hasil dari evaluasi yang diberikan oleh ACDP melalui indikator yang diatas melihat bahwa ESSP dalam pelaksanaanya memiliki permasalahan terhadap negara Indonesia dalam bidang pendidikan, sehinggan dengan adanya penjelasan ini dapat melihat motif yang dimiliki oleh negara Australia terhadap Indonesia melalui ESSP.

[20] *Performance Oversight and Monitoring (POM) Education Partnership - Independent Completion Report (ICR)*. Desember 2016. https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/indonesia-education-partnership-completion-report.pdf. Diakses pada tanggal 1 Mei 2019. Hal. 21

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menggunakan konsep atau teori dari Martinussen dan Pedersen yang bernama *motive and interest* sebagai landasan penulis dalam melihat motif suatu negara. *Motive and interest* mempunyai beberapa variabel dalam melihat motif suatu negara, yaitu motif politik dan keamanan nasional, motif ekonomi, motif lingkungan, serta motif moral dan kemanusiaan.

Melalui konsep *motive and interest* milik dari Martinussen dan Pedersen, penulis menggunakanya ke dalam studi kasus negara Australia dalam pemberian bantuan pendidikan terhadap Indonesia melalui ESSP. Penulis melihat bahwa negara Australia memiliki motif dan kepentingan terhadap Indonesia melalui ESSP mengingat bahwa negara Australia sebelumnya selain sudah memberikan dana bantuan pendidikan melalui AIBEP.

Sehingga penulis akan menganalisis motif bantuan Australia terhadap Indoensia melalui ESSP pada tahun 2011 – 2014 dengan mengunakan konsep milik Martinussen dan Pedersen yaitu *motive and interst* dengan beberapa variabel yang akan digunakan dalam sub – bab ini.

5.1 Motif Politik dan Keamanan Nasional

Dalam penelitian ini, Martinussen dan Pedersen menjelaskan bahwa negara donor dalam memberikan bantuan memiliki beberapa motif didalamnya. Salah satu motif yang dimiliki oleh negara donor menurut Martinussen dan

Pedersen adalah melalui motif politik dan kemanan nasional.[1] Hal ini dikarenakan pemberian bantuan luar negeri berdasarkan pada motif politik dan keamanan nasional biasanya memiliki latar belakang yaitu menjaga perdamaian dan kepentingan kemanan nasional di negara donor dalam bidang militer.[2] Namun pemberian bantuan luar negeri dari negara donor pada umumnya diberikan dalam bentuk *development assistance* yang bertujuan untuk pembangunan di negara penerima.

Dalam melihat motif politik dan kemanan nasional, penulis dengan menggunakan konsep dari Martinussen dan Pedersen akan menjelaskannya melalui tiga indikator yaitu adalah *security and peace, diplomatic power,* dan *diplomatic relation*. Dengan adanya ketiga indikator tersebut penulis mengharapkan akan menemukan motif dan kepentingan dari negara Australia dalam memberikan bantuan terhadap Indonesia melalui kerja sama pendidikan melalui ESSP yang nantinya akan ditarik kesimpulan melalui ketiga indikator tersebut.

5.1.1 *Peace and security*

Peace and security merupakan salah satu indikator bagi penulis untuk melihat bantuan luar negeri bersifat militer yang akan dibentuk melalui sebuah aliansi militer atau politik. Namun menurut Martinussen dan Pedersen, hal ini sangat jarang terjadi untuk bantuan luar negeri di dalam kerja sama di bidang pembangunan. Namun bila digunakan pada kasus negara Australia dengan

[1] Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book. Hal. 12
[2] Ibid.

Indonesia dalam pelaksanaan program ESSP dengan pendekatan indikator tersebut, program bantuan ESSP sangat berguna bagi Australia dalam menangani isu keamanan yang terjadi di sekitar, khususnya melawan terorisme yang terjadi di Indonesia yang menurut *foreign policy* Australia merupakan salah satu ancaman bagi negaranya terutama sekolah Madrasah yang ada di Indonesia.[3]

Selain itu melalui *Subsdiary Arrangement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of Australia Relating to Australia's Education Partnership with Indonesia Contribution to The Education Sector Support Program (ESSP)* pada poin ke sebelas mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Australia berkomitmen untuk melawan kejahatan internasional khususnya teroris yang ada di dunia dan pendanaan dalam mengangani hal tersebut harus sesuai dengan aturan *United Nations Security Council* (UNSC) yang berkaitan dengan resolusi UNSC nomor 1373 (2001), 1267 (1999) dan resolusi lain yang berkaitan dengan terorisme internasional.[4] Menurut penulis berpendapat bahwa terorisme merupakan salah satu ancaman negara bagi pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan nasional.

Hal ini dibuktikan karena Indonesia pada tahun 2009 telah mengalami tragedy bom di hotel J.W Marriot dan Ritz Caltron yang menelan korban 1 orang

---

[3] *Aid to Indonesian Islamic schools helps undermine terrorism*. 26 Februari 2011. https://www.eastasiaforum.org/2011/02/26/aid-to-indonesian-islamic-schools-helps-undermine-terrorism/?format=pdf. Diakses pada tanggal 14 Juli 2019.

[4] *Subsdiary Arrangment Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia Relating to Australia's Education Partnership with Indonnesia Contribution to the Education Sector Support Program.* June 2011. Kemendikbud. Hal. 5

warga negara Australia pada tanggal 17 Juli 2009.[5] Dan salah satu pelaku bom bunuh diri hotel J.W Marriot merupakan seorang remaja yang baru saja lulus dengan berumur 18 tahun.[6] Selain itu pelaku bom bali pada tahun 2002 juga merupakan salah satu kelompok teroris yang berasal dari Madrasah yang ada di Lamongan.[7] Sehingga menurut penulis melihat bahwa tindakan terorisme yang ada di Indonesia merupakan salah satu bagian dari kurangnya pendidikan terhadap sekolah – sekolah yang ada di Indonesia khususnya sekolah Madrasah dan sekolah – sekolah yang ada di Indonesia khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dengan melihat hal ini, pemerintah Australia dalam menangani tindakan aksi terorisme yang ada di Indonesia melakukan pemberian bantuan luar negeri melalui ESSP dengan mempunyai tujuan terhadap pendidikan di sekolah Madrasah dengan mengalokasikan dana sebesar AUD47 juta dengan komponen utamanya yaitu melalui pengimplementasi pendidikan di Madrasah dengan jumlah anggaran sebesar AUD12 juta dan pemberian bantuan pendidikan dalam bentuk *block grant* sebesar AUD35 juta.[8] Selain itu dengan melakukan pembangunan sekolah dengan anggaran sebesar AUD215.7 juta diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan 9 tahun untuk laki – laki dan perempuan agar Dengan adanya

---

[5] *Inilah Data Korban Bom Marriot dan Ritz – Caltron*. https://nasional.kompas.com/read/2009/07/18/21572416/inilah.data.korban.bom.marriott.dan.ritz-carlton. Diakses pada tanggal 7 Juni 2019

[6] *Pelaku Bom Bunuh Diri Marriott Remaja 18 Tahun* https://tekno.kompas.com/read/2009/08/08/18180192/pelaku.bom.bunuh.diri.marriott.remaja.18.tahun. Diakses pada tanggal 7 Juni 2019

[7] *Adik pelaku Bom Bali tolak ISIS*. 27 Agustus 2014. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140827_tolak_isis_surabaya. Diakses pada tanggal 7 Juni 2019.

[8] *Subsdiary Arrangment Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia Relating to Australia's Education Partnership with Indonnesia Contribution to the Education Sector Support Program.* June 2011. Hal. 3

indikator pembangungan terhadap sekolah Madrasah dan sekolah 9 tahun yaitu SD, SMP, dan SMA pemerintah Australia mengharapkan dapat mengurangi angka tindakan terorisme yang ada di Indonesia.

Dalam memaknai dari indikator *peace and national security*, penulis menyimpulkan bahwa motif Australia dalam upaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan dilakukan melalui pemberian bantuan terhadap sekolah Madrasah dan sekolah – sekolah lain terutama SMA yang ada di Indonesia dalam mengurangi tindakan aksi terorisme yang ada di Indonesia mengingat bahwa Indonesia sering terjadi tindakan aksi terorisme yang rata – rata pelakunya berasal dari Madrasah dan SMA.

5.1.2 *Diplomatic Power*

Diplomatic Power merupakan salah satu indikator yang dalam mencapai kepentingan politik negara donor dengan mendapatkan dukungan politik dan pengakuan secara diplomatis di sistem internasional. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa bantuan yang diberikan oleh Australia dalam mendapatkan pengakuan di internasional melalui ESSP dilakukan melalui kebijakan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang kebijakan tersebut diadopsi dari *United nations Millennium Summit* pada bulan September 2000.[9]

Penulis melihat bahwa motif bantuan pemerintahan Australia setelah mengadopsi kebijakan MDGs yang dibuat oleh UN, secara tidak langsung pemerintah Australia mempunyai tujuan yang sama melalui kebijakan luar

[9] *BUDGET AusAID.* 11 Mei 2010. https://archive.budget.gov.au/2010-11/ministerial_statements/ausaid.pdf. Diakses pada tanggal 6 Juni 2011. Hal. 5

negerinya melalui AusAID. Didalam kerja sama pendidikan antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia mengatakan bahwa Australia merupakan salah satu negara donor terbesar yang memberikan bantuan pendidikannya ke Indonesia dan juga salah satu mitra terpecaya dalam melaksanakan program pendidikan di Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu program 9 tahun melalui sekolah formal dan informal, kesetaraan *gender* dan pembangunan infrastuktur sekolah menjadi salah satu bukti bahwa Australia mempunyai kekuatan diplomatik melalui pengakuan dari negara Indonesia dalam bidang pendidikan.[10] Dengan adanya hal ini melihat bahwa hubungan antara negara Australia dengan negara Indonesia dalam pemberian bantuan pendidikan melalui ESSP sangat erat satu dengan yang lainnya.

Menurut penulis menyimpulkan bahwa walaupun negara Australia hanya mendapatkan pengakuan dari negara Indonesia sebagai mitra terpecaya dalam bidang pendidikan, namun hal itu sudah membuktikan bahwa Australia mendapatkan kekuatan diplomatik atau sering disebut dengan *diplomatic power* dalam melihat motif dari negara donor dalam pemberian bantuan luar negeri terhadap negara penerima. Dan disini penulis melihat bahwa Australia mempunyai motif politik dan keamanan melalui indikator *diplomatic power* dalam melihat Australia sebagai negara yang memiliki motif dalam pemberian bantuan terhadap Indonesia melalui ESSP.

[10] *Australia's Education Partnership with Indonesia (A Contribution to The Government of Indonesia's) Education Sector Support Program* (Final). Okober 2010. Kemitraan Australia Indonesia. Hal. 10

5.1.3. *Diplomatic Relation*

Dalam indikator *diplomatic relation* diperlukan adanya hubungan yang sangat erat terhadap negara penerima dan memiliki ketergantungan antara negara donor dengan negara penerima baik dalam pemberian bantuan luar negeri atau melakukan kerja sama antar kedua negara tersebut.[11] Dengan adanya hal seperti ini motif suatu negara dalam pemberian bantuan luar negeri memiliki motif yang dapat dilihat melalui *diplomatic relation.*

Dalam melihat motif Australia melalui hubungan kerja sama pendidikan dengan Indonesia dalam ESSP penulis menemukannya didalam kerangka kerja ESSP yang telah dibuat antara negara Australia dengan negara Indonesia. menurut penulis negara Australia berpendapat bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara terpenting baginya dalam melakukan kerja sama di bidang pendidikan dan merupakan salah satu negara yang memberikan bantuan pendidikan terbesar ke Indonesia.[12] Selain itu, pemerintah Australia juga menyebutkan bahwa negara Australia dan Indonesia mempunyai tujuan yang sama dalam bidang pendidikan yaitu meningkatkan kualitas dan stabilitas pendidikan yang ada antara negara Indonesia dan Australia, meningkatkan ekonomi dan bisnis antar kedua negara, dan mempererat hubungan kerja sama bilateral dalam bidang pendidikan.[13] Dengan adanya hal seperti ini merupakan salah satu bagian penting bagi penulis

[11] Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book. Hal. 12
[12] *Australia's Education Partnership with Indonesia (A Contribution to The Government of Indonesia's) Education Sector Support Program* (Final). Okober 2010. Kemitraan Australia Indonesia. Hal. 3
[13] Ibid

untuk melihat bahwa negara Australia memiliki motif politik dan kemanan nasional melalui ESSP.

Kemudian dengan adanya mieningkatan kualitas pendidikan, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan *gender* antara laki – laki dengan perempuan yang sudah di komitmenkan oleh pemerintah Australia terhadap Indoensia dalam bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam meningkatkan hubungan kerja sama terhadap Indonesia melalui pendidikan menurut penulis bahwa kerja sama pendidikan melalui program ESSP.[14]

Dengan adanya pemberian bantuan pendidikan yang berkelanjutan ini membuat penulis melihat bahwa pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia mempunyai motif politik dan kemanan melalui pendekatan *diplomatic relations*

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa negara Australia memiliki motif terhadap negara Indonesia melalui indikator *diplomatic relations* yang sudah dilakukan sejak lama. Selain itu pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia memiliki keinginan bersama dalam menigkatkan kualitas pendidikan dan perekonomian melalui pengurangnan angka kemiskinan di Indonesia.

[14] *Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) Independent Completion Report (ICR)*. Mei 2010. https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/aibep-executive-summary.pdf. Diakses pada tanggal 5 Mei 2019. Hal. 16

5.2 Motif Ekonomi

Menurut Martinussen dan Pedersen, motif ekonomi merupakan salah satu bentuk kebijakan luar negeri negara donor untuk memotivasi negara donor dalam mencapai kepentingan komserialnya. Sebagai contohnya adalah sebuah negara penjajah yang cenderung lebih memilih memberikan bantuannya kepada negara bekas jajahannya untuk tetap mempertahankan akses terhadap sumber daya dan akses pasar di wilayah negara bekas jajahan.[15] Sedangkan untuk negara yang tidak memainkan peran penting dalam penjajahan akan menentukan pemberian bantuannya dengan mempertimbangkan kepentingan perdagangannya.[16] Menurut Martinussen dan Pedersen, salah satu cara bagi negara donor yang memiliki kepentingan bisnis adalah dengan membuat sebuah bantuan yang memiliki sifat mengikat terhadap negara penerima. Dalam beberapa perundingan pada umumnya bantuan luar negeri yang mengikat mempunyai fokus pada keinginan atau permintaan negara donor dalam membeli barang atau jasa yang berasal dari negara donor melalui pemberian bantuan luar negeri dari negara donor tersebut.[17]

Dalam melihat motif ekonomi yang dimiliki oleh negara Australia dalam memberikan bantuan terhadap Indonesia melalui ESSP akan dijelaskan melalui tiga indikator yaitu *trade relation, investment,* dan *access* yang nantinya akan melihat motif sesungguhnya negara Australia dalam pemberian bantuan pendidikan.

---

[15] Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book. Hal. 12
[16] Ibid. Hal. 13
[17] Ibid.

5.2.1 *Trade Relation*

Didalam indikator *trade relation* dalam pemberian bantuan luar negeri sering digunakan oleh negara donor kepada negara penerima dalam peningkatan ekspor dan impor produk baik barang atau jasa dari negara penerima.[18] Dengan adanya kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh negara donor ke negara penerima akan dinilai bahwa sesungguhnya negara donor juga mempunyai motif terhadap negara penerima dalam bidang eknomi melalui pemberian bantuan luar negeri.

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya dengan menghubungkan dengan negara Australia dalam pemberian bantuan terhadap negara Indonesia melalui kerja sama pendidikan dalam ESSP penulis menemukan adanya kegiatan ekspor – impor yang dilakukan antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia melalui kerja sama pendidikan melalui ESSP. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatkan kegiatan ekspor barang di bidang manufaktur yang dilakukan oleh negara Australia terhadap Indonesia yang dilakukan selama lima tahun sebelum diberikannya bantuan ESSP.[19]

---

[18] Ibid.

[19] *Australia's Education Partnership with Indonesia (A Contribution to The Government of Indonesia's) Education Sector Support Program* (Final). Okober 2010. Kemitraan Australia Indonesia. Hal. 3

[19] [19] *Australia In the Asian Century White Paper*. Oktorber 2012. Departemen of Defence and Strategy. http://www.defence.gov.au/whitepaper/2013/docs/australia_in_the_asian_century_white_paper.pdf. Diakses pada 20 Juli 2019. Hal. 41

Gambar 5.1 Perkembangan ekspor Australia dalam bidang manufaktur di kawasan Asia

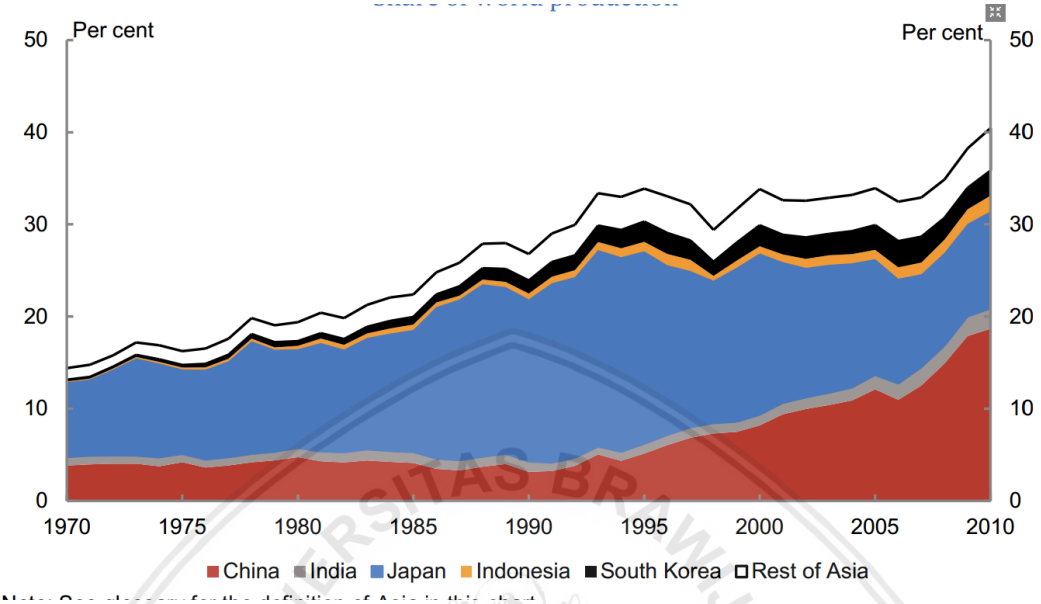

pada tahun 1970 - 2010

Sumber: *whitepaper Australia in the Asian Century*. Oktober 2012

Dengan melihat gambar diatas, pemerintah Australia juga mengharapkan dengan pemberian bantuan ESSP ke Indonesia dapat meningkatkan perdagangan antara Australia dan Indonesia terutama dalam ekspor manufaktur yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya berdasarkan pada *foreign policy* Australia yang ingin meningkatkan perdanganan di negara kawasan Asia, terutama negara Indonesia dalam perluasan pasar dan meningkatkan ekonomi negara Australia.

Selain itu total perdangangan Australia dengan Indonesia pada bulan Januari 2014 mencapai US$ 6.146,29 juta yang mengalami kenaikan sebesar 4,93% jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang berjumlah US$ 5.857,30 juta.[20] Dengan adanya hal ini, melihat bahwa perkembangan kegiatan ekspor yang

[20] *Perkembangan Perdangangan Indonesia – Australia Periode: Januari – Juli 2014*. https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/04/13/report-1428901991.pdf. Diakses pada tanggal 15 Juli 2019. Hal. 2

dilakukan Australia terhadap Indonesia selama melaksanakan program ESSP memiliki motif ekonomi berdasarkan *foreign policy* Australia.

Sehingga menurut penulis menyimpulkan bahwa untuk melihat motif Australia dalam memberikan bantuan terhadap Indonesia melalui kerja sama pendidikan menggunakan indikator *trade relation* menemukan adanya hubungan melalui peningkatan kegiatan ekspor yang dinginkan Australia terhadap negara Indonesia ketika memberikan bantuan pendidikan melalui ESSP.

5.2.2 *Investment*

Dalam indikator *investment* dijelaskan bahwa negara donor dalam pemberian bantuan terhadap negara penerima dalam melihat motif ekonomi akan mengadakan peningkatan investasi yang sudah terhadap negara penerima melalui pemberian bantuan.[21] Kemudian dengan adanya peningkatan investasi yang dilakukan oleh negara donor terhadap negara penerima akan dilihat dengan adanya peningkatkan ekonomi negara donor dan pembukaan pasar di negara penerima. Dan negara donor juga memiliki motif dan kepentingan terhadap negara penerima dalam memperkuat hubungan kerja sama melalui kegiatan investasi yang diharapkan dapat memiliki *feedback* kembali kepada negara donor.

Bila dihubungan dengan pemerintah Australia dalam meningkatkan investasi di negara Indonesia melalui pemberian bantuan melalui kerja sama pendidikan dalam ESSP ditemukan bahwa selain negara Australia merupakan salah satu pemberi bantuan terbesar dalam bidang pendidikan selam dua tahun

[21] Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book. Hal. 12

dan merupakan salah satu partner terpecaya bagi Indonesia dalam bidang pembangunan pendidikan yang ada di Indonesia.[22] Hal ini dilakukan oleh negara Australia karena negara Indonesia memiliki potensi yang bagus dalam perkembangan ekonomi untuk jangka waktu panjang dan sangat menguntungkan bagi pemerintah Australia bila melakukan pemberian bantuan luar negeri terhadap Indonesia di bidang pendidikan berdasarkan pada *foreign policy* Australia yang dikeluarkan pada tahun 2012.[23]

Gambar 5.2 Asia's demographic dividend for Australia pada tahun 1950 – 2025

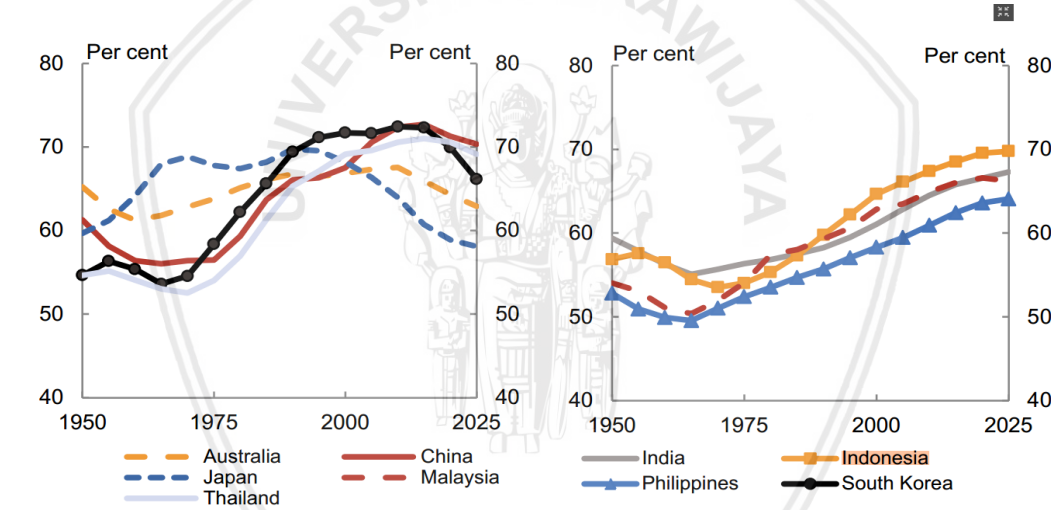

Source: UN (2011b).

Sumber: *whitepaper Australia in the Asian Century*. Oktober 2012

Selain itu, Australia melakukan kegiatan pemberian bantuan pendidikan terhadap Indonesia melalui ESSP dikarenakan Indonesia adalah merupakan salah

[22] *Australia's Education Partnership with Indonesia (A Contribution to The Government of Indonesia's) Education Sector Support Program* (Final). Okober 2010. Kemitraan Australia Indonesia. Hal. 3

[23] *Australia In the Asian Century White Paper*. Oktorber 2012. Departemen of Defence and Strategy. http://www.defence.gov.au/whitepaper/2013/docs/australia_in_the_asian_century_white_paper.pdf. Diakses pada 20 Juli 2019. Hal. 35

satu cara bagi Australia untuk memperluas pasar di negara Indonesia dalam mengembangkan ekonomi Australia.

Dengan adanya hal seperti ini, penulis menyimpulkan bahwa untuk melihat motif Australia dalam memberikan bantuan terhadap Indonesia melalui kerja sama pendidikan dalam ESSP dengan menggunakan indikator *investment* melihat bahwa pemerintah Australia mengharapkan adanya timbal balik atau *feedback* yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam memenuhi kepentingan nasional dari negara Australia.

5.2.3 *Access*

Berdasarkan pada indikator *access,* pemberian bantuan luar negeri yang dilakukan oleh negara donor merupakan salah satu cara untuk mendapatkan sumber daya alam yang dimiliki dan memenuhi kebutuhan negara donor dalam meningkatkan perekonomian dan memperluas pasar perdagangan di negara penerima.[24]

Bila dibandingkan dengan kasus Australia dalam memberikan bantuan melalui kerja sama pendidikan terhadap Indonesia melalui ESSP berdasrkan pada *forein policy* dapat dilihat melalui perluasan pasar di Indonesia dalam bidang ekonomi. Seperti pada gambar sebelumnya bahwa peningkatkan nilai ekspor yang telah dilakukan negara Australia selama pelaksanaan ESSP di Indonesia membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi dalam

[24] Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book. Hal. 12

meningkatkan ekonomi negara Australia.[25] Selain itu membantu negara Indonesia dalam bidang pendidikan melalui ESSP juga merupakan salah satu strategi Australia untuk jangka panjang untuk mempertahankan pasar di Indonesia yang sudah dibangun sejak lama.

Dengan adanya hal ini penulis menarik kesimpulan bahwa pemberian bantuan pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia dalam kerja sama pendidikan melalui ESSP melalui indikator *access* memiliki motif. Motif yang dimiliki oleh negara Australia terhadap negara Indonesia adalah motif ekonomi dalam akses pasar yang ada di Indonesia karena negara Australia selain negara yang sering melakukan kegiatan ekspor ke Indonesia, juga Australia ingin mempertahankan pasar yang selama ini dibangun dalam bidang ekonomi.

5.3 Motif Lingkungan

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu bagian dari peningkatan angka kemiskinan yang ada di negara berkembang, khususnya negara penerima bantuan luar negeri.[26] Dalam mengurangi angka kemiskinan di negara berkembang, dibutuhkannya pendidikan sebagai salah satu alat untuk mengurangi angka kemiskinan. Dan dari pengurangan angka kemiskinan, dapat terlihat untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi di negara berkembang.[27]

---

[25] *Australia In the Asian Century White Paper*. Oktorber 2012. Departemen of Defence and Strategy. http://www.defence.gov.au/whitepaper/2013/docs/australia_in_the_asian_century_white_paper.pdf. Diakses pada 20 Juli 2019. Hal. 35

[26] Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book. Hal. 11

[27] *Aktif Bersama Indonesia.* 2015. OECD. http://www.oecd.org/global-relations/Active_with_Indonesia_BA.pdf. Diakses pada tanggal 20 Juli 2019

Martinussen dan Pedersen dalam melihat motif lingkungan memiliki beberapa indikator yang didalamnya, yaitu *environmental improvement* dan *international responsibility*. Kedua indikator ini akan melihat bagaimana motif negara donor memberikan bantuan luar negeri melalui pendidikan dalam mengurangi kerusakan lingkungan khususnya negara Australia terhadap negara Indonesia dalam melakukan kerja sama pendidikan melalui ESSP.

5.3.1 *Enviromental Improvement*

Dalam indikator *environmental improvement* dijelaskan bahwa negara donor memiliki tanggung jawab dalam upaya perbaikan lingkungan yang ada disekitar untuk mengurangi permasalahan lingkungan melalui lintas batas negara.[28] Tanggung jawab ini merupakan salah satu kewajiban dari negara donor untuk melakukan perbaikan lingkungan yang ada karena dianggap bahwa kemiskinan yang ada di negara penerima merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan.[29] Dan kerusakan lingkungan juga merupakan salah satu ancaman bagi negara donor karena selain dapat merusak lingkungan yang ada di batas wilayah negaranya, juga termasuk salah satu kepentingan negara donor untuk melindungi warga negaranya yang diakibatkan dari kerusakan lingkungan.[30]

Sehingga dalam hal ini negara donor memiliki kewajiban untuk memperbaiki lingkungan yang ada di negara berkembang khususnya negara penerima bantuan berdasarkan dari *national interest* dan menjadikan hal tersebut

---

[28] Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book. Hal. 11
[29] Ibid.
[30] Ibid. Hal. 12

sebagai salah satu bentuk motif lingkungan terhadap negara penerima dalam rangka memperbaiki lingkungan.

Dalam menghubungkan motif lingkungan dengan menggunakan indikator *environmental improvement* dalam pemberian bantuan Australia melalui kerja sama pendidikan terhadap Indonesia melalui ESSP, penulis tidak menemukan adanya motif Australia dalam memberikan bantuan pendidikan ke Indonesia melalui ESSP berdasarkan pada motif lingkungan. Hal ini dikarenakan dalam kerangka kerja ESSP, pemerintah Australia mempunyai tujuan kepada Indonesia melalui beberapa komponen yang ada didalamnya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan sembilan tahun dan sekolah Madrasah, meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, dan meningkatkan kesetaraan *gender* menjadi salah satu kunci utama Australia dalam memberikan bantuan dalam ESSP.[31] Selain itu, dalam kebijakan luar negeri Australia melalui *Australia in the Asian Century* tidak ditemukan adanya upaya negara Australia untuk memperbaiku permasalahan lingkungan terhadap negara kawasan di Asia karena visi dari kebijakan luar negeri Australia adalah *"mengamankan negara Australia sebagai negara yang lebih makmur dan tangguh dari dalam dan luar negeri Australia dan terbuka untuk dunia."*[32]

---

[31] *Australia's Education Partnership with Indonesia (A Contribution to The Government of Indonesia's) Education Sector Support Program* (Final). Okober 2010. Kemitraan Australia Indonesia. Hal. 3

[32] *Australia In the Asian Century White Paper*. Oktorber 2012. Departemen of Defence and Strategy. http://www.defence.gov.au/whitepaper/2013/docs/australia_in_the_asian_century_white_paper.pdf. Diakses pada 20 Juli 2019. Hal. 1

Melihat hal ini, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan indiakator *environmental improvement* melihat bahwa Australia tidak memiliki motif lingkungan terhadap Indonesia dalam pemberian bantuan melalui ESSP dengan indikator *environmental improvement* dikarenakan fokus utama dalam Australia terhadap Indonesia selain ditunjukan meningkatkan kualitas pendidikan sembilan tahun dan sekolah Madrasah, meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik dan meningkatkan kesetaraan *gender* juga di dalam *foreign policy* milik Australia tidak ditemukan adanya upaya Australia dalam memperbaiki lingkungan yang ada di Indonesia.

5.3.2 *International Responsbility*

Melalui indikator *international responsibility* Martinussen dan Pedersen mengatakan bahwa dengan adanya upaya negara donor membantun negara penerima dalam memperbaiki lingkungan, negara donor sudah menunjukan sikap peduli terhadap masalah lingkungan yang sedang dihadapi oleh dunia internasional.[33]

Dalam mengkaitkan indikator *international responsibility* dengan pemberian bantuan Australia melalui kerja sama pendidikan terhadap Indonesia melalui ESSP tidak menemukan adanya motif negara Australia dalam pemberian bantuan terhadap Indonesia melalui ESSP. Menurut penulis, pemberian bantuan pendidikan yang dilakukan oleh Australia melalui kerja sama atau *partnership* lebih di dominasi oleh pembangunan sumber daya manusia yang ada di Indonesia.

[33] Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book. Hal. 16

Hal ini dilakukan oleh pemerintah Australia beserta dengan anggota *partnership* lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sembilan tahun melalui pembangunan sekolah – sekolah yang ada di Indonesia khususnya sekolah SD, SMP, SMA dan Madrasah, meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik dan juga untuk meningkatkan kesetaraan *gender* terhadap kaum laki – laki dan kaum perempuan menjadi alasan utama bagi negara Australia untuk pemberian bantuan melalui kerja sama pendidikan terhadap Indonesia dalam ESSP.[34] Selain itu negara Australia dalam melihat negara Indonesia sebagai *partnership* dalam mengembangkan pasar yang berdasarkan pada *foreign policy* negara tersebut tidak ditemukan adanya keingingan Australia untuk memperbaiki lingkungan di negara Indonesia melalui ESSP walaupun negara Indonesia termasuk masih di dalam kategori kemiskinan.[35] Sehingga pemberian bantuan Australia ke Indonesia melalui ESSP tidak memiliki tujuan dalam bidang lingkungan, melainkan memiliki tujuan dalam bidang pendidikan berdasarkan pada perluasan pasar dalam meningkatkan ekonomi.

Melihat hal ini, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan indikator *international responsibility* melihat bahwa Australia tidak memiliki motif terhadap Indonesia dalam indikator tersebut dikarenakan fokus utama Australia melalui ESSP lebih ditujukan dalam membangun infrastuktur sekolah –

---

[34] *Australia's Education Partnership with Indonesia (A Contribution to The Government of Indonesia's) Education Sector Support Program* (Final). Okober 2010. Kemitraan Australia Indonesia. Hal. 3

[35] *Australia In the Asian Century White Paper*. Oktorber 2012. Departemen of Defence and Strategy. http://www.defence.gov.au/whitepaper/2013/docs/australia_in_the_asian_century_white_paper.pdf. Diakses pada 20 Juli 2019. Hal. 25

sekolah yang ada di Indonesia, meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik dan juga meningkatkan kesetaraan *gender* menjadi prioritas utama bagi negara Australia di dalam ESSP. Selain itu negara Australia menggunakan pemberian bantuan terhadap Indonesia melalui ESSP memiliki tujuan untuk memperluas pasar di negara Indonesia.

5.4 Motif Moral dan Kemanusiaan

Berdasarkan pendapat dari Martinussen dan Pedersen, motif moral dan kemanusiaan untuk pemberian bantuan luar negeri merupakan salah satu bentuk prinsip dan nilai kewajiban bagi manusia untuk menolong manusia lain yang kurang beruntung. Dengan adanya pemikiran tersebut kemudian berkembang di dalam level negara dimana negara donor memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada negara yang membutuhkan.[36]

Namun pada pelaksanaan pemberian bantuan tersebut, negara donor memiliki motif dan kepentingan dengan menggunakan semboyan misi kemanusiaan.[37] Dengan adanya hal ini dapat dilihat bahwa motif moral dan kemanusiaan dalam bantuan luar negeri biasanya digunakan melalui misi kemanusiaan untuk mencapai tujuan bagi negara donor dan menjadi instrument kebijakan negara donor terhadap negara penerima.

Dalam menghubungkan motif moral dan kemanusiaan terhadap permasalahan pemberian bantuan Australia terhap Indonesia kerja sama pendidikan akan dilihat melalui indikator *poverty reduction* yang menjadi salah

[36] Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book. Hal. 16
[37] Ibid.

satu bagian bagi penulis untuk melihat dan menyimpulkan motif Australia terhadap Indonesia dalam bidang moral dan kemanusiaan mengingat bahwa Australia dan Indonesia memiliki hubungan moral yang cukup erat.

5.4.1 *Poverty Reduction*

Dalam indikator *poverty reduction* dapat dilihat melalui adanya upaya negara donor dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang berada di negara penerima.[38] Untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di negara berkemban dapat dilihat melalui pemberian program bantuan yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di negara penerima terutama dalam studi kasus Australia dalam pemberian bantuan pendidikan melalui ESSP.

Dalam studi kasus Australia dalam pemberian bantuan pendidikan melalui ESSP, penulis melihat bahwa kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia dikarenakan kekurangan akan pendidikan yang merata terhadap warga negara Indonesia yang seharusnya dapat dirasakan. Selain itu pemerintah Indonesia dalam memberikan pendidikan terhadap warga negaranya masih kurang dari hal yang diharapkannya walaupun aturan tersebut sudah tertuang dalam kebijakan nasional Indonesia dalam Renstra tahun 2010-2015.[39] Menurut pemerintah Australia, sebanyak 110 juta penduduk Indonesia hidup dibawah USD2 perhari dan 32 juta penduduk Indonesia hidup di garis kemiskinan. Kemudian anak – anak Indonesia yang termasuk dalam kategori miskin berjumlah dua puluh persen

[38] Martinussen dan Pedersen. *Op.Cit*. Hal. 10
[39] *Australia's Education Partnership with Indonesia (A Contribution to The Government of Indonesia's) Education Sector Support Program* (Final). Okober 2010. Kemitraan Australia Indonesia. Hal. 3

(20%) untuk merasakan program pendidikan sembilan (9) tahun belajar dan perbedaan pendidikan dasar antara laki – laki dengan perempuan menjadi salah satu bagian dari kemiskinan.[40] Hal ini menjadikan salah satu kepentingan pemerintah Australia dalam menyampaikan kepentingan nasional terhadap pemerintah Indonesia melalui pemberian bantuan melalui ESSP.

Namun pemberian bantuan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia melalui ESSP tidak luput dari hasil *foreign policy* Australia yang melihat bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat berpengaruh bagi Australia dalam memperluas pasar dan juga meningkatkan integrasi serta keamanan nasional.[41] Selain itu juga negara Australia dalam memberikan bantuan pendidikan terhadap Indonesia merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan kerja sama yang telah lama dibangun dan salah satu bentuk investasi bagi Australia untuk jangka panjang mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat.[42]

Dengan adanya hal ini, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan indikator *poverty reduction* dalam melihat motif bantuan Australia terhadap Indonesia dalam kerja sama pendidikan melalui ESSP bahwa pemerintah Australia sebenarnya memiliki motif dalam hal moral dan kemanusiaan terhadap

---

[40] *Australia's Education Partnership with Indonesia (A Contribution to The Government of Indonesia's) Education Sector Support Program* (Final). Okober 2010. Kemitraan Australia Indonesia. Hal. 3

[41] *Australia In the Asian Century White Paper*. Oktorber 2012. Departemen of Defence and Strategy. http://www.defence.gov.au/whitepaper/2013/docs/australia_in_the_asian_century_white_paper.pdf. Diakses pada 20 Juli 2019. Hal. 15

[42] Ibid. Hal. 17

Indonesia melalui kerja sama pendidikan dalam ESSP. Hal ini ditandai dengan adanya pemerintah Australia melalui ESSP berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan juga untuk memperkuat hubungan kerja sama, perluasan pasar, keamanan nasional dan investasi untuk jangka panjang yang memiliki keuntungan besar bagi negara Australia dalam meningkatkan ekonomi, stabilitas, dan integritas baik di kawasan dan juga di dunia Internasional. Selain itu, meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pendidikan sembilan tahun dengan fokus pada SD, SMP, SMA, dan sekolah Madrasah merupakan komitmen pemerintah Australia terhadap Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik dan meningkatkan kesetaraan *gender* juga dilakukan oleh pemerintah Australia melalui ESSP sehingga dalam hal ini negara Australia memiliki motif dalam moral dan kemanusiaan terhadap negara Indonesia.

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Melalui penelitian yang telah dilakukan dalam menganalisa motif bantuan Australia dalam kerja sama pendidikan melalui *Education Sector Support Program* (ESSP) pada tahun 2011 – 2014 dengan menggunakan konsep dari Martinussen dan Pedersen menjelaskan bahwa negara Australia ternyata memiliki motif terhadap Indoensia melalui ESSP baik secara kelihatan atau tidak kelihatan.

Dari penelitian yang penulis temui menujukan bahwa Australia memiliki beberapa motif terhadap Indonesia yaitu motif politik dan kemananan nasional, motif ekonomi, serta motif moral dan kemanusiaan. Pada motif politik dan kemanan nasional menjelaskan bahwa Negara Australia sangat menjaga keamanan negaranya dengan melakukan pemberian bantuan pendidikan terhadap Indonesia dengan sasaran dan tujuannya pada sekolah – sekolah SD, SMP, SMA dan Madrasah dalam mencegah tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia pada tahun 2002 dan 2009 silam.

Kemudian pada sisi motif ekonomi kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah Australia sudah diberikan sejak awal melalui investasi pendidikan terhadap Indonesia dan menjadi kepercayaan negara Indonesia dalam pemberian bantuan pendidikan sehingga menurut penulis investasi yang dilakukan oleh negara Australia dalam bidang pendidikan melalui program ESSP sangat terlihat

yang menurut penulis negara Australia mendapatkan *feedback* dari negara Indonesia setelah pemberian bantuan pendidikan tersebut dan adanya perluasan pasar yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap Australia dalam kegiatan ekspor dan impor serta akses yang diberikan oleh negara Indonesia merupakan salah satu cara yang digunakan oleh Pemerintah Australia dalam meningkatkan ekistensi negaranya di kawasan dan juga di dunia Internasional.

Dan pada sisi motif moral dan kemanusiaan pemerintah Australia melalui kerangka kerja yang tertuang dalam draft final ESSP menyebutkan bahwa pemberian bantuan Australia terhadap Indonesia melalui ESSP dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia dikarenakan negara Indonesia masih hidup di bawah USD2 perhari dan 32 juta penduduk Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan. Namun walaupun demikian, pemberian bantuan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Australia melalui ESSP tidak terlepas dari motif dan kepentingan nasionalnya dalam melihat negara Indonesia sebagai salah satu pasar Australia dalam bidang ekonomi dan investasi untuk jangka panjang dalam memperkuat hubungan antara Australia dan Indonesia. Sehingga menurut penulis Australia memiliki motif moral dan kemanusiaan dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan dari variabel yang telah dijelaskan sebelumnya melalui motif politik dan kemanan nasional, motif ekonomi, dan motif moral dan kemanusiaan penulis memberikan kesimpulan bahwa negara Australia dalam memberikan bantuan terhadap Indonesia melalui kerja sama pendidikan dalam ESSP memiliki motif dalam berbagai bidang dan pemberian bantuan pendidikan merupakan salah

satu alat kebijakan suatu negara khususnya negara Australia dalam menncapai kepentingan nasionalnya di negara penerima yaitu negara Indonesia.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, penulis ingin merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut yaitu:

1. Dalam rangka memahami *motive and interest* yang memiliki kaitannya pada *foreign aid,* peneliti sebleumnya diharuskan untuk mendalami beberapa aspek-aspek dasar negara yang bersangkutan seperti kondisi domestik, karakteristik, kebijakan luar negeri, dan juga hubungan kerja sama antar negara serta hubungan ke lingkungan internasional
2. media yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, hal ini untuk mengantisipasi adanya kesalahan persepsi dan kesalahan dalam memasukan data.
3. Untuk keperluan penelitian berikutnya, penulis menyarankan penggunaan konsep *motive and interest* dari Martinussen dan Pedersen yang dapat dioperasionalisasikan dalam meneliti motif bantuan dari negara donor ke negara penerima dalam menganalisis kepentingan nasional atau kepentingan di balik pemberian bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Helen V Milner. *Why Multilateralism? Foreign Aid Domestic Principal Agent Problem*. 2006.

Carol Lancaster. 2000. *Transforming Foreign Aid – United State Assistance in 21st Cemtury*

Carol Lancaster. 2007. *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*.

Robert Gilpin. 1978. *The Political Economy of International Relations.* New Jersey: Princenton. University Press

David Sogge. 2002. *Give and Take: Whats The Matter with Foreign Aid*. London: Zed Book.

K.J Holsti. *International Politics: A Framework for Analysis.* London: Prentice-Hall International, Inc. 1974

Martinussen & Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed. Book.

Mochtar Mas'oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta, LP3ES).

JURNAL

Asra Virginita & Mahanani Pratiwi. *Motif Dibalik Pelaksanaan Program Millenium Chalange Account (MCA) Amerika Serikat di Indonesia*. Jurnal Global & Strategis. Juni 2015. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs79b77a6853full.pdf

Fiona Baily. *North – South Educational Partnership, A Critical Analysis: An Ireland, Uganda, Lesotho and Zambia Case Study*. Januari 2016. https://dspace.mic.ul.ie/bitstream/handle/10395/2066/Baily%2C%20Fiona%20%282016%29%20NorthSouth%20educational%20partnership%2C%20a%20critical%20analysis%20an%20Ireland%2C%20Uganda%2C%20Lesotho%20and%20Zambia%20case%20study%20Phd.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Martinussen dan Pedersen dalam tulisan Asante Oduro Michael. *China as a Game Changer in Aid and Diplomatic Relations: A Case of Norwegian Aid and Diplomatic Relation in Africa*. 2006 Master Thesis of Faculty of Social

Science. Departement of International Enviroment and Development Studies. NorwegianUniversity.https://nmbu.brage.unit.no/nmbuxmlui/bitstream/handle/11250/2398869/Final%20Thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Diakses pada 7 Juni 2019.

PUBLIKASI RESMI

Asian Development Bank (ADB). May 2010. *Republic of Indonesia: Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership*. https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/63665/43273-01-ino-tar.pdf

Australia's Education Partnership with Indonesia (A Contribution to The Government of Indonesia's) Education Sector Support Program (Final). Okober 2010. Kemitraan Australia Indonesia.

BUDGET AusAID. 11 Mei 2010. https://archive.budget.gov.au/2010-11/ministerial_statements/ausaid.pdf. Diakses pada tanggal 6 Juni 2011.

Subsdiary Arrangment Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia Relating to Australia's Education Partnership with Indonnesia Contribution to the Education Sector Support Program. June 2011. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Kurniawan Ariadi. *Hibah Luar Negeri APBN dan Grant Trap*. Edisi 23 Tahun 2003.https://www.bappenas.go.id/files/6313/5185/0724/kurniawan__20091015125220__2355__0.pdf

Australia In the Asian Century White Paper. Oktorber 2012. Departemen of Defence and Strategy. http://www.defence.gov.au/whitepaper/2013/docs/australia_in_the_asian_century_white_paper.pdf. Diakses pada 20 Juli 2019

Arsip Bagian Kerja sama Luar Negeri Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Republik Indonesia – Pemerintah Australia.* 2014.

Aktif Bersama Indonesia. 2015. OECD. http://www.oecd.org/global-relations/Active_with_Indonesia_BA.pdf. Diakses pada tanggal 20 Juli 2019

Perkembangan Perdangangan Indonesia – Australia Periode: Januari – Juli 2014. Kemendag. https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/04/13/report-1428901991.pdf. Diakses pada tanggal 15 Juli 2019

repository.ub.ac.id

WEBSITE

Australia's Aid Program. https://dfat.gov.au/aid/Pages/australias-aid-program.aspx. Diakses pada tanggal 6 Juni 2011

Inilah Data Korban Bom Marriot dan Ritz – Caltron. https://nasional.kompas.com/read/2009/07/18/21572416/inilah.data.korban.bom.marriott.dan.ritz-carlton. Diakses pada tanggal 7 Juni 2019

Pelaku Bom Bunuh Diri Marriott Remaja 18 Tahun https://tekno.kompas.com/read/2009/08/08/18180192/pelaku.bom.bunuh.diri.marriott.remaja.18.tahun. Diakses pada tanggal 7 Juni 2019

Adik pelaku Bom Bali tolak ISIS. 27 Agustus 2014. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140827_tolak_isis_surabaya. Diakses pada tanggal 7 Juni 2019.

Aid to Indonesian Islamic schools helps undermine terrorism. 26 Februari 2011. https://www.eastasiaforum.org/2011/02/26/aid-to-indonesian-islamic-schools-helps-undermine-terrorism/?format=pdf. Diakses pada tanggal 14 Juli 2019.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA